

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN
FUNGSIONAL (KF) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BUTA AKSARA
(Studi di Dinas Pendidikan Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANTONIUS PAPPANG
155030901111021**



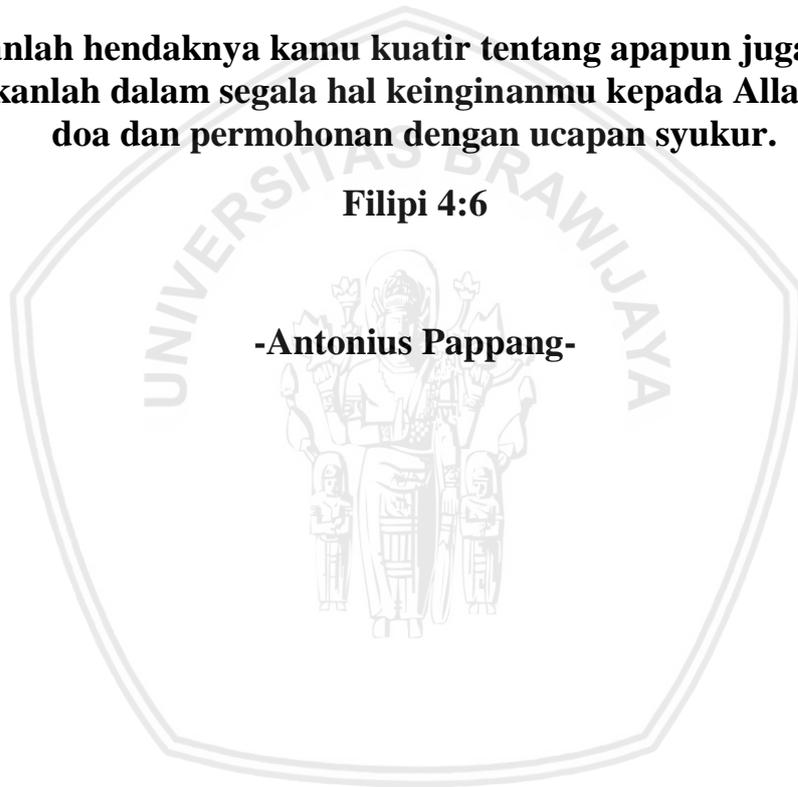
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019**

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

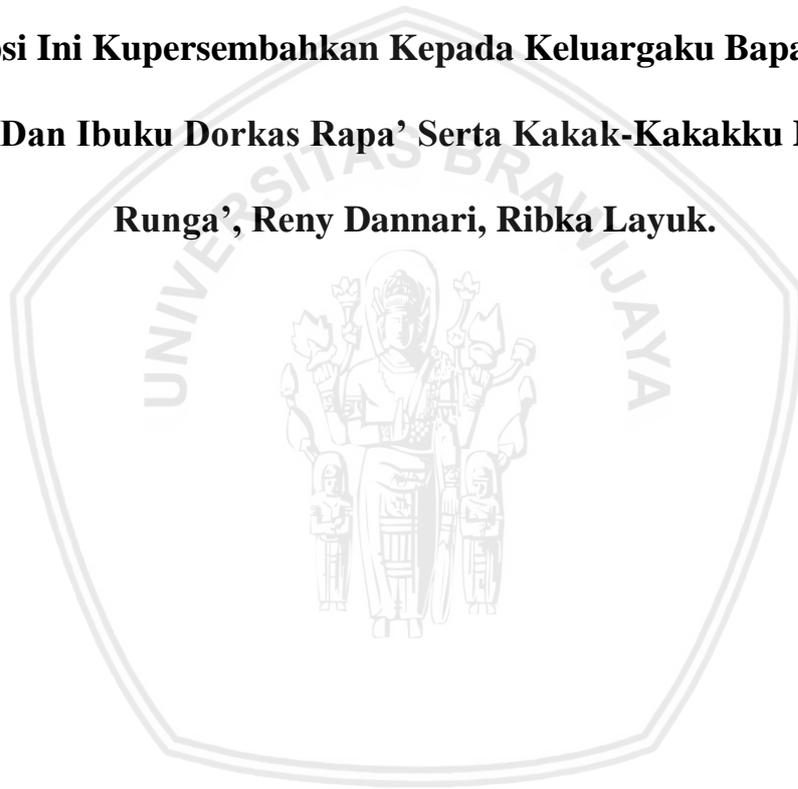
Filipi 4:6

-Antonius Pappang-



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku Bapakku Y.
Batik Dan Ibuku Dorkas Rapa' Serta Kakak-Kakakku Martina
Runga', Reny Dannari, Ribka Layuk.**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara (Studi di
 Pendidikan Kota Batu)

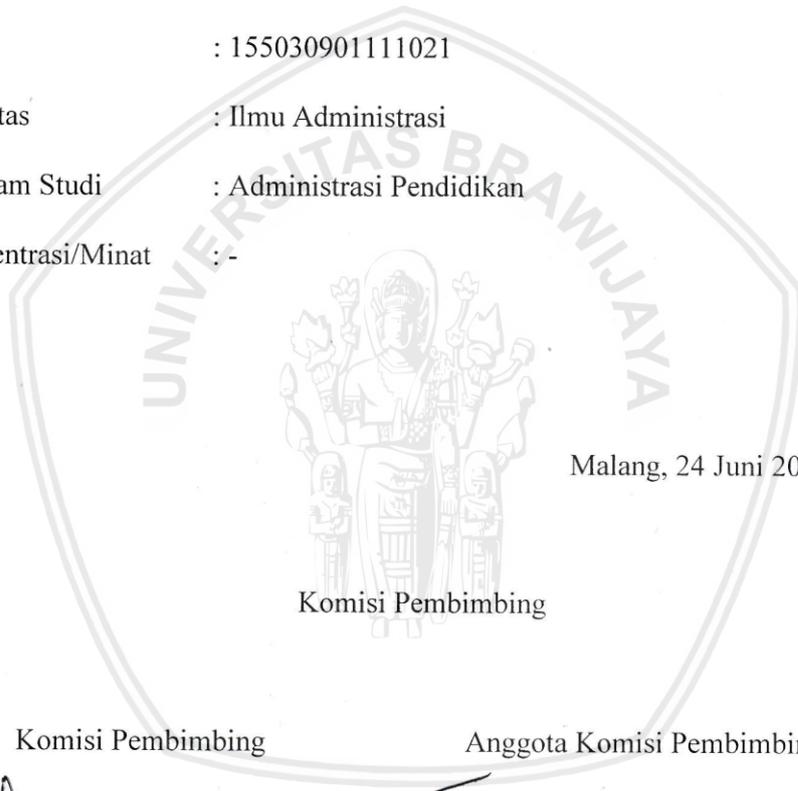
Disusun oleh : Antonius Pappang

NIM : 155030901111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Pendidikan

Konsentrasi/Minat :-



Malang, 24 Juni 2019

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
 NIP. 194508171974122001


Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
 NIP. 197307132006041001



TANDA PENGESAHAN

Telah di pertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 18 Juli 2019
 Pukul : 11.00-12.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Antonius Pappang
 Judul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara (Studi
 di Dinas Pendidikan Kota Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 194508171974122001

Anggota



Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 197307132006041001

Anggota



Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP
NIP. 201107851214001

Anggota



Dr. Rer. Pol., Romy Hermawan, S.Sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 Juni 2019

Mahasiswa



Antonius Pappang

NIM 155030901111021

RINGKASAN

Antonius Pappang, 2019. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara (Studi di Dinas Pendidikan Kota Batu). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Anggota Dosen Pembimbing: Dr. Ainul Hayat, S.Pd M.Si.

Program Keaksaraan Fungsional adalah Program yang ditujukan kepada masyarakat yang masih buta huruf. Tujuan dari program Keaksaraan Fungsional ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari. Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri melaksanakan program Keaksaraan Fungsional untuk memberantas masyarakat yang buta huruf khususnya masyarakat di Kota Batu, karena Kota Batu masih mempunyai permasalahan masyarakat buta huruf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen. Lokasi Penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Batu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu sudah berjalan baik. Antusias masyarakat untuk mengikuti program ini sangat tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu ditandai dengan adanya keterampilan yang diperoleh masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya rasa percaya diri dari sebagian masyarakat khususnya laki-laki karena malu mengakui bahwa mereka buta huruf. Organisasi pelaksana program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu adalah Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya bidang Pendidikan Non Formal sebagai penanggung jawab.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan khususnya kepada masyarakat buta huruf, Dinas Pendidikan sebaiknya mengajarkan keterampilan lebih banyak lagi dan meningkatkan peran dan usaha dari organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Masyarakat Buta Huruf



SUMMARY

Antonius Pappang. 2019. The Implementation of Functional Literacy Program (KF) in Illiteracy Community Empowerment (Study in Batu City Education Office). Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, University of Brawijaya. Chair of supervisor : Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin. Advisory member: Dr. Ainul Hayat, S.Pd.M.Si.

The Functional Literacy Program is a program which aimed at the people who are still illiterate. The aim of this program is to develop the ability of learning in mastering and using writing, reading, counting, thinking, observing, listening and speaking Bahasa Indonesia that are oriented on a basis daily life. The Education Office of Batu city itself is implementing a functional literacy program to eradicate illiterate people because Batu City still has a problem regarding illiterate people.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques that used in this study are documentation, observation, and interviews. Primary data was obtained from interviews. While secondary data was obtained from existing documents. The location of this research was at the Education Office of Batu City.

The result of this study indicating that the implementation of functional literacy program at the Education Office of Batu city has been going well. The enthusiasm of the community to join this program is very high. The success of this program in Batu city was marked by the skills acquired by the community as a source of income. The obstacle experience in the implementation of the program was the lack of self-confidence of some people especially men, because of the embarrassment of admitting that they were illiterate. The implementing organization of functional literacy programs in Batu City is the Education Office of Batu City, especially in the field of Non Formal education as the person in charge.

The advice given by researchers is to increase public awareness of the importance of education especially for illiterate communities. The Education Office should teach more skills and increase the role and effort of the implementing organization namely Education Office of Batu City.

Key words : Implementation, empowerment, Illiterate People

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat unruk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Pendidikan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Hermawan, S,IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Administrasi Publik yang sudah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang sudah membantu dalam urusan akademik.
7. Kepala dan Sekertaris serta seluruh staff Dinas Pendidikan Kota Batu yang sudah membantu dan mengizinkan untuk melakukan penelitian.
8. Informan pegawai Dinas Pendidikan Kota Batu dan masyarakat Kota Batu yang sudah membantu dalam penelitian ini.
9. Bapak Y.Batik, Ibu Dorkas Rapa', Kakak Martina Runga', Reny Dannari, Ribka Layuk yang sudah mendokan dan memotivasi.
10. Teman-teman seperjuangan Eca, Mikha, Murni, Yessy, Alle, Christi, Badilo, Vera yang selalu mendukung dalam doa dan memberi motivasi.
11. Komunitas Lebah Madu Vando, Irwan, Mondang, Monic, Yessy yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa.
12. Keluarga Visitasi Gospel Bertha, Nidia, Paskah, Ambon, Sarah, Anggi yang selalu menghibur dan mendoakan.
13. Keluarga Laskar Dunamis yang sudah menjadi keluarga kedua di perantauan.
14. PMK IMMANUEL sebagai wadah pelayanan dan tempat bertumbuh selama di Malang.

15. Teman-teman HIMADIKHA yang sudah mau berproses bersama selama perkuliahan.

16. Kelompok magang Trias, Meriza, Dinda, Laili yang sudah membantu dan berproses bersama selama perkuliahan.

Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk bisa lebih baik ke depannya. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa serta semua pihak yang membutuhkan.



Malang, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Implementasi Program	13
1. Pengertian Program	13
2. Pengertian Implementasi Program	14
3. Model Implementasi Program	16
4. Unsur-unsur Implementasi Program	18
5. Proses Implementasi Program	19
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	20
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
4. Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	26
5. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.....	27
C. Partisipasi Masyarakat	27
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	27
2. Partisipasi Masyarakat	28
3. Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat	30
D. Pendidikan Non Formal	31
1. Pengertian Pendidikan Non Formal	31
2. Tujuan Pendidikan Non Formal	32
3. Karakteristik Pendidikan Non Formal.....	32
4. Peran Pendidikan Non Formal	34



E.	Keaksaraan Fungsional	35
1.	Pengertian Keaksaraan Fungsional	35
2.	Tujuan dan Fungsi Keaksaraan Fungsional.....	36
3.	Tahapan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional	37
4.	Prinsip-Prinsip Pembelajaran Keaksaraan Fungsional	38
5.	Strategi Pembelajaran Keaksaraan Fungsional	39
6.	Penilaian Hasil Belajar Keaksaraan Fungsional.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Jenis Penelitian.....	43
B.	Fokus Penelitian	44
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	45
D.	Jenis dan Sumber Data	46
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
H.	Keabsahan Data.....	55
BAB VI	PENYAJIAN DAN ANALISIS	57
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	57
1.	Gambaran Umum Kota Batu	57
2.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Batu.....	63
B.	Penyajian Data	72
1.	Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.	72
2.	Faktor Peendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara. ..	99
C.	Analisis Data	104
1.	Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.....	105
2.	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.....	123
BAB V	PENUTUP.....	132
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	138	
DAFTAR LAMPIARAN	145	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara di Jawa Timur6

Tabel 2: Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara di Kota Batu.....7

Tabel 3: Daftar Nama Peserta Program Keaksaraan Fungsional Tahun 2017 dan
2018.....84

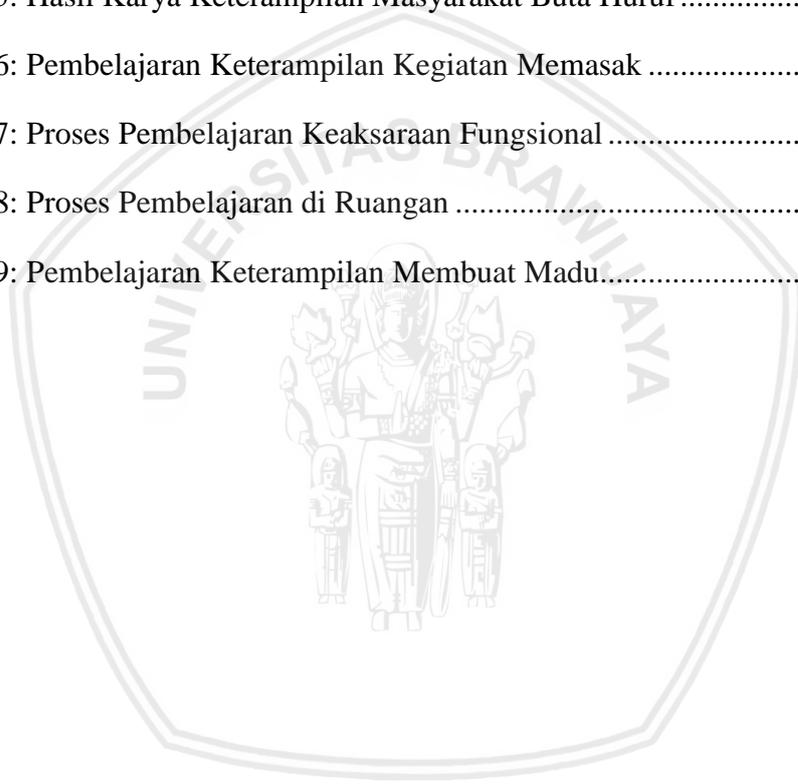
Tabel 4: Anggaran Biaya Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional Tahun
2019.....93

Tabel 5: Temuan Penelitian125



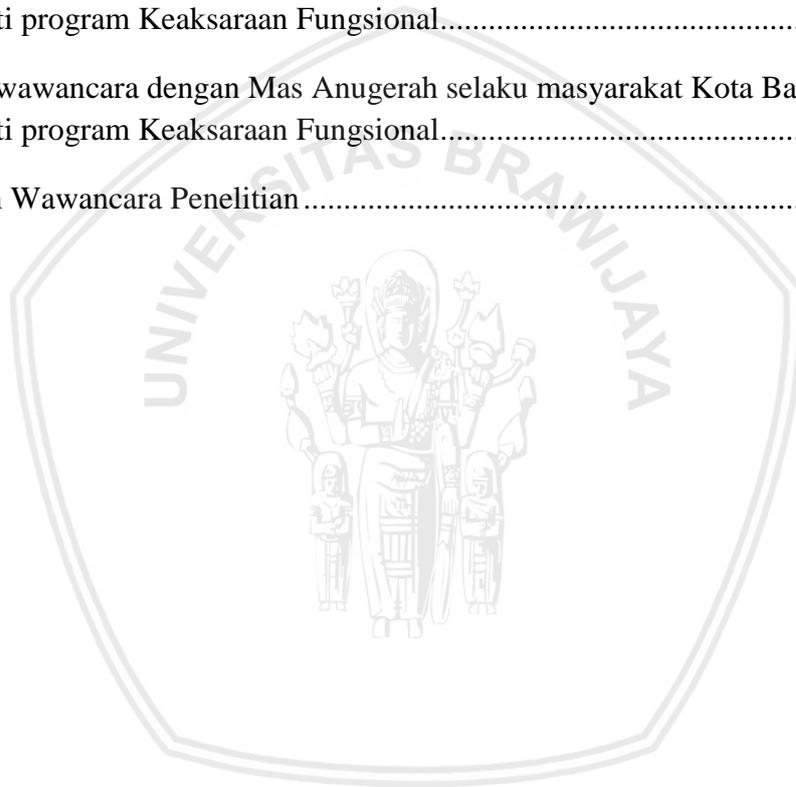
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model Kesesuaian Implementasi Program.....	16
Gambar 2: Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif.....	53
Gambar 3: Peta Kota Batu.....	62
Gambar 4: Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu.....	67
Gambar 5: Hasil Karya Keterampilan Masyarakat Buta Huruf.....	77
Gambar 6: Pembelajaran Keterampilan Kegiatan Memasak.....	83
Gambar 7: Proses Pembelajaran Keaksaraan Fungsional.....	90
Gambar 8: Proses Pembelajaran di Ruang.....	93
Gambar 9: Pembelajaran Keterampilan Membuat Madu.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

Ijin Surat Penelitian.....	141
Kerangka Acuan Kerja.....	144
Gambar wawancara dengan ibu Titing Nurhayati Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Batu	149
Gambar wawancara dengan Mas Dani selaku masyarakat Kota Batu yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional.....	150
Gambar wawancara dengan Mas Anugerah selaku masyarakat Kota Batu yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional.....	151
Pedoman Wawancara Penelitian.....	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan mempunyai arti yaitu proses kehidupan dalam mengembangkan potensi dan pengetahuan setiap individu untuk bisa hidup dan melangsungkan kehidupannya Shantini (2010:2). Pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dalam kehidupan manusia guna menghadapi masa depan setiap individu yang akan datang. Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat Depdiknas (2003:74) karena pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi dirinya.

Berkembangnya suatu Negara tidak lepas dari berkembangnya pendidikan dalam Negara itu sendiri. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang

saling melengkapi dan memperkaya Depdiknas (2003: 77). Pendidikan nonformal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap dan pengganti sistem pendidikan formal yang ada. Pendidikan nonformal mempunyai program layanan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (www.kemdikbud.go.id). Pendidikan non-formal adalah salah satu jalur pendidikan yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan bangsa dalam menghadapi perkembangan jaman dan mampu meningkatkan mutu pendidikan bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, memungkinkan semua warga masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai sumber informasi. Hal ini menuntut semua warga masyarakat untuk memiliki kemampuan yang mendasar yaitu kemampuan keaksaraan (membaca, menulis, dan berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang benar) yang bersifat fungsional sehingga dapat menggali, memperoleh dan mengelola informasi secara mudah. Selain itu kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sangat penting untuk ditanamkan dalam kehidupan setiap manusia agar dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan adanya pendidikan nonformal, yang didalamnya terdapat Program Keaksaraan Fungsional. Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar Sujarwo (2008: 4). Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan nonformal yang ditujukan untuk anggota masyarakat yang masih buta huruf. Buta huruf dalam arti kurang memahami lambang huruf yang dijadikan alat komunikasi dilingkungan masyarakat Shantini (2010:1). Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memilih misi antara lain “Terbentuknya pelaku serta ekosistem pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong” (*bindikmas.go.id*).

Upaya untuk mengurangi jumlah buta aksara di tanah air, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDI dan DIKMAS) menyediakan Program Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri. Keaksaraan Dasar merupakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sedangkan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan

peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) yang dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya (www.paud-dikmas.go.id). Prinsipnya kedua program tersebut adalah program Keaksaraan Fungsional (KF) yang telah dikembangkan sejak tahun 1995 sampai saat ini. Program Keaksaraan Fungsional Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suryadi (2006:1) yang mengatakan bahwa:

“program keaksaraan fungsional adalah sala satu bentuk layanan pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung), yang bersifat fungsional bagi kehidupannya. Warga belajar tidak hanya membutuhkan kemampuan calistung, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dan keterampilan berusaha atau bermatapencaharian saja, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan hidup (*service*) dalam kehidupan yang terus berubah”.

Merujuk pada Buku Panduan Penyelenggaraan dan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Fungsional tahun 2018 melalui Program Keaksaraan Fungsional, masyarakat penyandang Buta Aksara diharapkan dapat memiliki kemampuan dan kompetensi dasar sebagai berikut :

Pertama adalah Sikap, yaitu masyarakat diharapkan mampu Menghayati dan mengamalkan ajaran agama/ kepercayaan yang dianutnya sehingga berperilaku dan memiliki etika sebagai warga yang baik, kedua adalah Pengetahuan, yaitu mampu menguasai pengetahuan faktual, konseptual,

dan prosedural tentang cara meningkatkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia, dan ketiga adalah keterampilan, yaitu mampu mengolah, menalar, dan menyaji pengetahuan yang diperoleh dalam praktek untuk kemandirian berkarya dalam menjalankan peran dan fungsi di masyarakat melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia. Sehingga masyarakat sangat diharapkan dapat mencapai kemampuan dan kompetensi tersebut setelah selesai mengikuti pembelajaran program Keaksaraan Fungsional

Buta aksara merupakan penghambat utama bagi individu penyandangannya untuk bisa mengakses informasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Akibatnya, mereka tidak mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk bisa bangkit dari himpitan kemiskinan, kemelaratan, dan keterpurukan dalam kehidupannya. Setiap warga masyarakat perlu memiliki kemampuan keaksaraan pada tingkat tertentu, yang merupakan penguasaan kecakapan keaksaraan untuk dapat memahami dunia dan berhasil mengangkat derajat hidup dan kehidupannya (Dewi, 2015:3,4).

Berikut ini merupakan tabel dengan jumlah penduduk masyarakat buta aksara yang ada di Provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara di Jawa Timur Tahun 2011-2017

	Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara (Jiwa)		
	Umur 15 tahun keatas	Umur 15-44 tahun	Umur 45 tahun keatas
2011	12.20 %	2.59 %	26.86 %
2012	11.18 %	2.24 %	25.12 %
2013	9.86 %	1.84 %	22.22 %
2014	8.64 %	1.43 %	19.66 %
2015	8.53 %	1.24 %	19.24 %
2016	8.41 %	1.09 %	18.84 %
2017	8.18 %	1.01 %	18.27 %

Sumber : www.bps.go.id tahun 2017

Menurut data jumlah penduduk masyarakat buta aksara yang ada di Jawa Timur tersebut dalam kurun waktu tuju tahun tingkat buta aksara di Jawa Timur mengalami penurunan. Tingkat penurunan buta aksara yang ada di Jawa Timur dalam kurun tahun 2011 sampai 2017 cenderung menurun yang dapat dilihat dalam persentase menurut kelompok umur. Dilihat menurut penjelasan tabel 1, pada tahun 2011 tingkat penduduk masyarakat buta aksara yang ada di Provinsi Jawa Timur menurut persentase kelompok umur menjadi yang paling tinggi dengan total umur 15 tahun keatas sebesar 12.20 %, umur 15-44 tahun sebesar 2.59 % dan umur 45 tahun keatas sebesar 26.86 %. Sedangkan tahun dimana tingkat penduduk masyarakat buta aksara terendah ada di tahun 2017 dengan jumlah total umur 15 tahun keatas sebesar 8.18 %, umur 15-44 tahun sebesar 1.01 % dan umur 45 tahun keatas sebesar 18.27 %. Penduduk masyarakat buta aksara di Jawa Timur yang tersebar di wilayah kabupaten atau kota seperti yang ada di kota Batu. Hal ini dapat dilihat dengan tabel presentase jumlah penduduk masyarakat buta aksara yang ada di kota

Batu. Merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan angka penduduk masyarakat buta aksara ialah sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara di Kota Batu Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Masyarakat Buta Aksara (Jiwa)
2011	1.73 %
2012	1.68 %
2013	6.63 %
2014	5.21 %
2015	2.2 %
2016	3.05 %
2017	3.0%
2018	2.4%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Batu masih mempunyai permasalahan masyarakat buta aksara. Jumlah masyarakat penyandang buta aksara di Kota Batu tersebut perlu ditindak lanjuti supaya penduduk di Kota Batu dapat memperbaiki kehidupannya dalam bermasyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program Keaksaraan Fungsional sangatlah bermanfaat untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat mampu memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, agar mereka mampu memperbaiki taraf hidupnya dan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Kota Batu adalah salah satu kota yang berada di Jawa Timur, yang memiliki jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik kota Batu tahun 2017 sebanyak 202.319 ribu jiwa dan mempunyai permasalahan buta

aksara (*www.bps.go.id*). Tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi dan kepedulian terhadap pendidikan masih rendah, pemikiran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin mereka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga masih banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan Kota Batu tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional.

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 24 desa, adalah kecamatan Batu salah satu kecamatan yang sedang melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Karena program Keaksaraan Fungsional tersebut dianggap sebagai salah satu prioritas bagi masyarakat Kota Batu dalam memajukan pembangunan, khususnya dalam pembangunan pendidikan.

Dalam implementasinya program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu masih mengalami beberapa masalah. Ditandai dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya program Keaksaraan Fungsional sehingga sulit mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan ini karena, sebagian masyarakat beranggapan bahwa umur mereka sudah lanjut usia sehingga sudah terlambat dan tidak perlu lagi mengikuti pendidikan, padahal pendidikan tidak memandang faktor umur yang penting ada usaha, kemauan, dan semangat dari masyarakat. Adanya rasa kurang percaya diri

dari masyarakat khususnya laki-laki yang malu mengakui bahwa mereka buta huruf dan alasan karena bertani atau sibuk bekerja di ladang.

Kondisi sosial masyarakat Kota Batu sebagian masih bersifat tradisional karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena berbagai macam alasan, Hal inilah yang menjadi penyebab masih tingginya penyandang buta aksara di Kota Batu. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Batu dengan meneliti bagaimana pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu. Peneliti dalam hal ini juga menganalisis dari implementasi Program Keaksaraan Fungsional ini dapat membantu masyarakat buta aksara dalam peningkatan kesejahteraan.

Penerapan program Keaksaraan Fungsional dirasa sangatlah tepat dalam proses pemberdayaan masyarakat buta aksara di Kota Batu, berdasarkan penjelasan latar belakang sesuai permasalahan yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan judul “ **Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara Di Dinas Pendidikan Kota Batu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka berikut ini merupakan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara di Kota Batu ?

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, mempunyai tujuan yang dapat diketahui ialah sebagai berikut ini :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara di Kota Batu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan atau implementasi program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik yang dapat dilihat dari segi akademis maupun dari segi praktis yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum mengenai implementasi program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara di kota Batu.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang menangani program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara Kota Batu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini dibuat dengan tujuan agar dapat dan memudahkan pembaca untuk mengerti. Masing-masing bab secara jelas dan sistematika penulisan ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang akan dijelaskan masing-masing bab. Berikut ini merupakan penjelasan yang ada di masing-masing bab ialah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini peneliti menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara di Kota Batu.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang digunakan atau berkaitan dengan judul atau penelitian yang akan dilaksanakan yaitu program Keaksaraan Fungsional.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini secara umum menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Bab ini bertujuan untuk

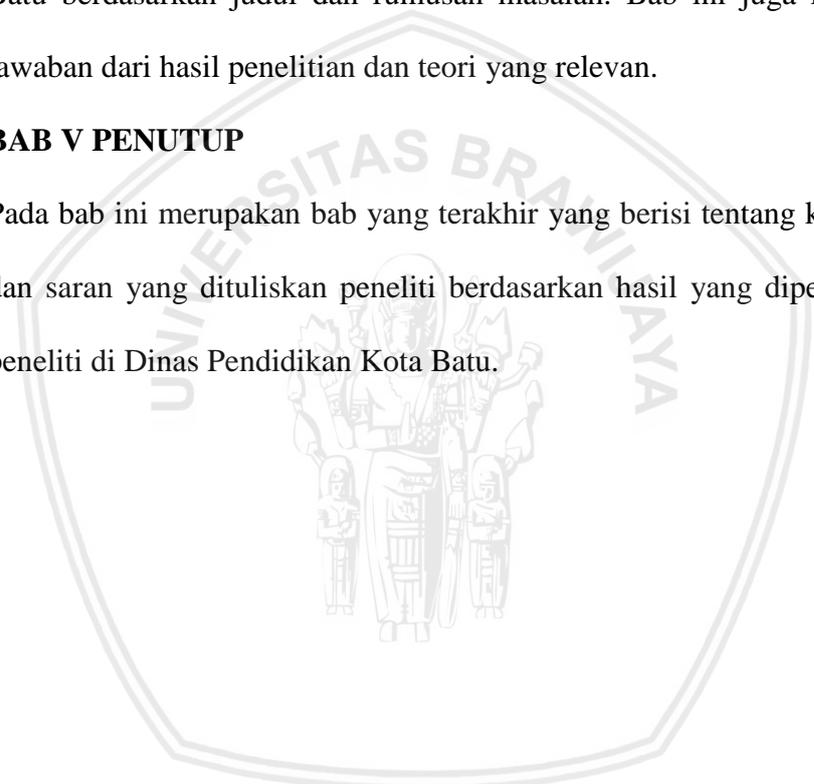
mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan mempermudah peneliti untuk proses analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian atau olahan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan judul dan rumusan masalah. Bab ini juga merupakan jawaban dari hasil penelitian dan teori yang relevan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dituliskan peneliti berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kota Batu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Program

1. Pengertian Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sedangkan menurut (Kunarjo, 2002:86) pengertian program yaitu merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau praktek dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus. Program selain sebagai alat untuk memecahkan masalah (*problem solving*) dapat juga digunakan sebagai motivasi dan inovasi bagi masyarakat terhadap program yang ada. Kelangkaan sumber daya merupakan hal yang tak terhindarkan dalam mencapai tujuan yang ada, maka diperlukan kemampuan bagi para pengelola pembangunan dalam menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumberdaya dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Mansyur (2010:2), program yaitu rangkaian dari proyek yang berhubungan dan berkelanjutan sampai waktu yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan proyek adalah sebagian

dari sebuah keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh suatu manfaat dengan harapan mendapatkan hasil pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program merupakan alat (instrument) kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi/lembaga masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Program

Syukur dalam Prasetyo (1987:398), menyebutkan bahwa implementasi program adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana program bisa diartikan penerepan. Selanjutnya implementasi program adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian tersebut memperhatikan bahwa kata program bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa program bukan sekedar aktivitas tetapi suatu yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Syukur dalam Prasetyo (2018:24) juga mengungkapkan bahwa “Implementasi program merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diterapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan”. Selanjutnya implementasi program juga membutuhkan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat programnya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Terkait dengan suatu program, Grindle dalam Prasetyo (2018:24) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Lebih jauh Mazmanian dan Sabatier dalam Widiado (2001:192) menjelaskan makna implementasi ialah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

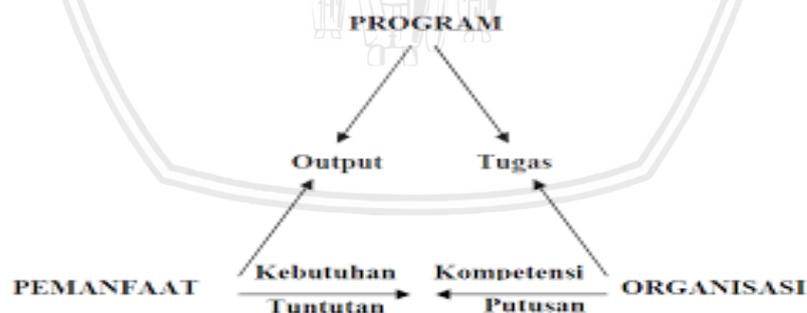
Implementasi program pada prinsipnya ialah agar sebuah kebijakan yang melatar belakangi program tersebut dapat mencapai tujuannya. Tidak kurang dan tidak lebih. Menurut Nugroho (2009:4940), bahwa untuk

mengimplementasikan kebijakan public, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan public tersebut.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun luar lapangan. Kegiatan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dihitung oleh alat-alat penunjang.

3. Model Implementasi Program

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: Korten dan Tarigan (2000: 12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten dalam Tarigan (2000: 12)

menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

1. Program

Kesesuaian antara program dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

2. Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3. Kelompok Sasaran/Pemanfaat

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh

kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

4. Unsur-unsur Implementasi Program

Menurut Syukur dalam Prasetyo (2018: 27-28), proses dalam suatu implementasi sekurang- kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi program selalu berhubungan dengan suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan melalui sebuah program, kegiatan, atau proyek. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan. Suatu program menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Sehingga program menurut Siagian dalam Prasetyo (2018: 28) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- d. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selain itu Grindle dalam Prasetyo (2018: 28) menjelaskan bahwa implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Teori Grindle ini memandang bahwa suatu kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Selain itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula telah diperinci, program aksi telah dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Program harus menggambarkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi (*interest of affected*)
- b. Jenis manfaat (*type of benefit*)
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
- d. Status pembuat keputusan (*site of decision making*)
- e. Pelaksana program (*program implementers*)
- f. Sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)

5. Proses Implementasi Program

Menurut Jones sesuai yang dikutip Usman (2002:28) ada tiga pilar aktivitas dalam proses pengoperasian yaitu:

- a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam pengoperasian program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang komponen dan berkualitas.

- b. Interfensi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Selain itu menurut Tachjan (2006:35) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat menurut Sutoro (2002:2)

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau

proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut (Theresia, 2015:29) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

a. Perbaikan Kelembagaan

Dengan melakukan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan

c. Perbaikan Pendapatan

Dengan memperbaiki bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena salah satu penyebab kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan

Dengan adanya pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lila (2015:30) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari :

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri setiap individu untuk mau berubah dan memperbaiki dirinya merupakan suatu titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan dari individu untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan tercapai dan tidak memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat.
- b. Menumbuhkan kemampuan dan keberanian pada masyarakat untuk mau melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan selama ini, kemudian mengambil keputusan mengikuti perubahan perbaikan yang diharapkan.

- c. Mengembangkan potensi dan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan bagi kehidupannya.
- d. Peningkatan peran atau partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat perbaikannya.
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan masyarakat pada kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- f. Peningkatan kompetensi diri masyarakat untuk mau melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Soebianto (2015:31) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam tujuh kegiatan pokok, yaitu :

- a. Penyadaran, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang kehidupan dan keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan yang menyangkut lingkungan fisik, teknis, social budaya, ekonomi dan politik proses penyadaran seperti itulah yang dimaksudkan oleh Freire (1976) sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan termasuk didalamnya penyuluhan.
- b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan keadaan sumberdaya (alam,

manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas, lingkungan teknis atau fisik, sosial budaya dan politis).

- c. Membantu memecahkan masalah yang ada, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- d. Menunjukkan dan menumbuhkan kepada masyarakat tentang pentingnya perubahan dalam kehidupan masyarakat, yang sedang dan akan terjadi di lingkungan, baik lingkungan organisasi atau masyarakat (lokal, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (eksternal dan internal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, agar masyarakat dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.
- e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.
- f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen, dan lain-lain) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain).
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok masyarakat lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-

pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas public), dan penguatan kapasitas lokal.

4. Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Penerima manfaat melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan menurut Theresia (2015:32-33) dapat dibedakan dalam :

- a. Pelaku utama, yang terdiri dari masyarakat dan keluarganya. Karena pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat sendiri dan anggota keluarganya, yang selain sebagai penerima manfaat juga sebagai pengelola kegiatan yang berperan sebagai penggerak dan memanfaatkan sumberdaya (faktor-faktor produksi) demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usaha tani serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam berikut dan lingkungan hidup yang lain.
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, pengendali kebijakan lingkungan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di atas terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung atau memperlancar kegiatan pembangunan pertanian.

5. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat, Theresia dalam Lila (2015 : 33) menyebutkan sebagai “agen perubahan”, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu fasilitator harus profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang .a). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh atau fasilitator. b). Penyuluh atau fasilitator swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta. c). penyulu atau fasilitator, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.

C. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan

tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Mikkelsen (2005:53) Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan konsep partisipasi ini, konsep partisipasi telah menjadi bagian dari debat yang berkepanjangan antara lain terkait landasan teoritis dan dengan kemungkinan untuk diterapkannya (*practical applicability*) yang terkait dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikelsen dalam Isbandi (2008: 106-107) biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut.

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek [pembangunan], tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*participation is the voluntary contribution by people in projects, but without their taking part in decision-making*);
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan (*participation is the sensitization of people to increase their receptivity and ability to respond to development projects*);

3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu (*participation is an active process, meaning that the person or group in question takes initiative and asserts the autonomy to do so*);
4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks social ataupun dampak social proyek terhadap masyarakat (*participation is the fostering of a dialogue between the local people and the project or programme preparation, implementation, monitoring and evaluation staff in order to obtain information on the local context and on social impacts*);
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*); dan
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri (*participation is involvement in people's development of themselves, their lives, their environment*).

Beberapa pengertian partisipasi di atas menurut Mikkelsen kadang kala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya (*genuine participation*).

Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2005:54) berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi (*guine participation, initiated and managed by people themselves, is a goal in the democratic process.*)

3. Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat

Bentuk dan tipe partisipasi masyarakat menurut Suntoyo (2004:2) Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, dan pengambilan keputusan.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri

kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

D. Pendidikan Non Formal

1. Pengertian Pendidikan Non Formal

Menurut Indriana (2014:2) Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan formal di sekolah, karena pendidikan nonformal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan nonformal diidentik dengan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu pendidikan nonformal dilakukan diluar sekolah, maka sasaran pokok adalah anggota masyarakat. Sebab itu program pendidikan

nonformal harus dibuat sedemikian rupa agar bersifat luwes tetapi lugas, namun tetap menarik minat para konsumen pendidikan.

2. Tujuan Pendidikan Non Formal

Menurut Soebianto (2007:5) Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan non formal yang bersifat multi *purpose*. Ada tujuan-tujuan pendidikan non formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar (basic education) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup.

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.

3. Karakteristik Pendidikan Non Formal

Menurut Mazmanian (2008:3) Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun keduanya pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi. Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafeteria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab., peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.

7. Penggunaan sumber-sumber local. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin.

4. Peran Pendidikan Non Formal

Menurut (Soelaman, 1980:80) masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan non formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Peran pendidikan non formal adalah sebagai “pelengkap, penambah, dan pengganti” dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program pendidikan non formal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.
- b. Sebagai penambah pendidikan sekolah Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada: 1. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program

pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. 2. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. 3. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.

c. Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya.

Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program layanan, salah satunya adalah program Keaksaraan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi program Keaksaraan Fungsional akan kita kaji lebih dalam seperti penjelasan dibawah mengenai teori Keaksaraan Fungsional.

E. Keaksaraan Fungsional

1. Pengertian Keaksaraan Fungsional

Menurut Sujarwo (2008:4) pendidikan keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional, bagi upaya peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.

Sedangkan keaksaraan fungsional menurut Sujarwo (2008:4) adalah Suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar.

2. Tujuan dan Fungsi Keaksaraan Fungsional

Menurut Bawani (2014:6) Keaksaraan Fungsional mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik.
- b. Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik, untuk memecahkan masalah keaksaraannya.
- c. Menciptakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelolah sumber daya yang ada di lingkungannya.

- d. Dengan kemampuan calistung merupakan dasar untuk terciptanya masyarakat yang gemar belajar dan mampu menekan angka *drop out* di pendidikan persekolahan.
 - e. Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.
3. Tahapan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional

Tahapan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional menurut Bawani (2014:8) meliputi :

a. Tahap Pemberantasan

Tahap pemberantasan adalah tahap keaksaraan dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang menulis, membaca dan berhitung tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran warga belajar.

b. Tahap Pembinaan Kemampuan Fungsional

Tahap pembinaan kemampuan fungsional adalah tahap lanjutan, dimana warga belajar yang telah dapat membaca, menulis dengan lancar serta memiliki pengalaman, tetapi perlu meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tahap Pelestarian

Tahap pelestarian adalah tahap mandiri, warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan fungsional untuk dapat memecahkan masalah dan mencari informasi serta nara sumber sendiri. Warga belajar tahap ini dapat masuk KBU, keterampilan dan

lain-lain agar mereka dapat mengambnagkan kemampuan yang telah dimilikinya.

d. Sertifikat atau Surat Tanda Serta Belajar (STSB)

Adalah surat keterangan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada warga belajar yang telah mengikuti penilaian tahap akhir sesuai dengan tahap yang diikuti (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian) warga belajar yang menyelesaikan tahap keaksaraan dasar menerima STSB pemberantasan buta huruf dan boleh melanjutkan program Keaksaraan Fungsional untuk mengembangkan kemampuan fungsional. Warga belajar menerima STSB pelestarian dan boleh masuk program lain seperti KBU, kursus, keterampilan dan lain-lain.

4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Keunikan dalam pembelajaran orang dewasa memiliki strategi dalam mengembangkan kemampuan warga belajar berdasarkan pengetahuan bersifat fungsional. Menurut Sujarwo (2008), prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional sebagai berikut:

- a. Konteks Lokal, yaitu dengan mempertimbangkan: minat dan kebutuhan warga belajar, agama, budaya, bahasa, dan potensi lingkungan.

- b. Desain Lokal, yaitu proses pembelajaran yang merupakan respon (tanggapan) minat dan kebutuhan warga belajar yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok.
- c. Proses Partisipatif, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan warga belajar secara aktif dan memanfaatkan keterampilan yang sudah mereka miliki.
- d. Fungsional Hasil Belajar, yaitu hasil belajarnya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap positif dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup warga belajar.

Dari pemaparan di atas, dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional perlu diperhatikan empat prinsip yaitu memperhatikan konteks lokal, desain lokal, proses partisipatif, dan fungsional hasil belajar.

5. Strategi Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Menurut Suryadi dalam Lila (2015: 37-38) mengingat warga belajar program pendidikan KF pada umumnya merupakan kelompok orang dewasa, maka strategi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan hendaknya mengikuti kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa. Kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pembelajaran harus berorientasi pada pemecahan masalah lingkungan (problem solving oriented), permasalahan hendaknya digali dari pendapat dan diketahui oleh warga belajar.
- b. Pembelajaran harus berbasis pada pengalaman pribadi warga belajar (experience-based learning) agar semakin mudah dipahami.
- c. Pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bermakna (meaningfull) bagi warga belajar agar lebih diminati.
- d. Pembelajaran harus memberi kebebasan bagi warga belajar untuk ikut memilih isi dan proses belajar sesuai dengan minat, kebutuhan dan pengalamannya.

- e. Tujuan pembelajaran harus ditetapkan dan disetujui oleh warga belajar melalui kontrak belajar (learning contract).
- f. Warga belajar harus memperoleh umpan balik (feedback) terhadap dirinya tentang pencapaian hasil belajar masing-masing individu.
- g. Pembelajaran harus dimulai dari dan berdasrakan pada pengetahuan dan kompetensi yang ada sebelumnya (prior learning)
- h. Penguatan (reinforcement) harus bersifat positif dan meningkatkan motivasi belajar bagi warga belajar.
- i. Pembelajaran harus memungkinkan warga belajar untuk berpartisipasi secara aktif sehingga dapat memperbaiki dan memperpanjang ingatan.

6. Penilaian Hasil Belajar Keaksaraan Fungsional

Penilaian pada dasarnya merupakan proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dalam pengembangan kompetensi bagi warga belajar. Menurut Suryadi dalam Lila (2015:38) pengembangan instrumen untuk mengukur hasil belajar keaksaraan fungsional dapat diukur dengan langkah-langkah:

- a. Menelaah kembali Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang meliputi: kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, serta proses atau pengalaman dan hasil belajar.
- b. Menelaah dan menetapkan aspek yang hendak diukur (pengetahuan, keterampilan atau sikap nilai)
- c. Memilih teknik dan alat penilaian yang akan digunakan (penilaian tertulis, penilaian kinerja atau unjuk kerja atau perbuatan, atau penilaian hasil karya warga belajar.
- d. Menetapkan bentuk dan rancangan penyajian laporan hasil penilaian yang akan digunakan.

Beberapa kompetensi keaksaraan yang perlu dilaporkan secara deskriptif adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi membaca adalah kemampuan membaca yang dapat diperagakan warga belajar sesuai dengan tingkat kemampuan yang telah dicapainya (tingkat keaksaraan dasar, lanjut, atau mandiri).
- 2) Kompetensi menulis adalah, kemampuan menulis yang dapat diperagakan warga belajar sesuai dengan tingkat kemampuan yang telah dicapainya (tingkat dasar, lanjut, dan mandiri).
- 3) Kompetensi berhitung adalah kemampuan menghitung menggunakan lambang bilangan atau angka arab yang dapat diperagakan warga belajar sesuai dengan tingkat kemampuan yang telah dicapainya (tingkat keaksaraan dasar, lanjut dan mandiri).

- 4) Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang diperagakan warga belajar sesuai dengan tingkat kemampuan keaksaraan yang telah dicapainya (tingkat keaksaraan dasar, lanjut dan mandiri).

Berdasarkan tahapan yang telah dijelaskan diatas maka semua pembelajaran Keaksaraan Fungsional baik tahap dasar dan lanjutan akan dilaksanakan di Pusata Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pusat kegiatan belajar masyarakat menurut Sutaryat merupakan tempat belajar yang bentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat, yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatn program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya.

Program pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM digali dari kebutuhan nyata yang dirasakan warga masyarakat, dikaitkan dengan potensi lingkungan dan kemungkinan pemasaran hasil belajar. Dalam kegiatan pembelajaran keterampilan fungsional terintegrasi dengan seluruh program belajar, waktu belajar disesuaikan dengan kesiapan warga belajar. Program yang dilaksanakan dan kembangkan di PKMB tidak hanya program yang disponsori oleh instansi pendidikan non formal tetapi juga program dari instansi lain (seperti pertanian, kesehatan, perindustrian dan lain-lain).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk membandingkan antara teori dengan kejadian yang terjadi di lapangan melalui penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono dalam Prasetyo (2018:49) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan menurut Moleong (2014:5) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menjelaskan ataupun mengimplementasikan program Keaksaraan Fungsional yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan masyarakat buta aksara yang ada di Kota Batu.

Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode untuk memperoleh sesuatu yang

ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting untuk menghasilkan tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan hasil data ataupun informasi yang dapat diketahui dan dijelaskan secara baik tentang objek yang diteliti yaitu tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional yang ada di Kota Batu.

Informasi dan data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana membutuhkan data lisan dalam memberikan suatu informasi. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana interaksi dari beberapa aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan di Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batas yang bertujuan agar penelitian dapat lebih terarah dan nantinya dapat memberikan permasalahan terhadap penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif. Pernyataan ini sesuai dengan Moleong (2014 : 94) yang menyatakan bahwa “penetapan focus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian”. Melalui fokus penelitian yang sudah ditetapkan, maka peneliti

melakukan pembatasan menjadi lebih relevan. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti adalah menggunakan model implementasi program menurut Korten dalam Tarigan (2000: 12) sebagai berikut :

1. Impelentasi program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara, mengacu pada model implementasi program menurut Korten dalam Tarigan (2000: 12) karena menurut peneliti model ini sesuai dengan masalah yang diangkat dan salah satu model yang tepat untuk melakukan analisis terhadap suatu program. Model ini menggunakan tiga elemen dalam implementasi program sebagai berikut:
 - a. Program
 - b. Organisai Pelaksana
 - c. Kelompok Sasaran/Pemanfaat
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program Keaksaraan Fungsional dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lokasi dan situs penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan maksimal yang dibutuhkan peneliti yang sesuai dengan masalah, tema dan fokus penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan lokasi penelitian yang ada di Kota Batu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut

karena Kota Batu merupakan Kota yang masih aktif melaksanakan pendidikan Non formal dan melaksanakan program Keaksaraan Fungsional dan permasalahan masyarakat buta huruf di Kota Batu belum bisa dituntaskan seratus persen dari tahun ke tahun.

Sedangkan situs penelitian merupakan letak yang sebenarnya bagi peneliti untuk terjun ke lapangan untuk dapat memotret gambaran dan kondisi yang terjadi dalam rangka mengumpulkan dan memperoleh data secara informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh data ataupun informasi ialah di Dinas Pendidikan Kota Batu yang bertugas sebagai implementor program Keaksaraan Fungsional. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan pada lokasi penelitian tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan yang berkenaan dengan implementasi program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang telah digunakan ini selain menggunakan metode penelitian yang tepat, juga diperlukan metode dalam melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Adanya data atau informasi yang diperoleh merupakan salah satu faktor yang penting dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil data dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang telah diteliti. Data primer sendiri berisikan tentang kata-kata ataupun tindakan aktor-aktor yang diamati atau diwawancarai yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti. Data Primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu Ibu Titing Nurhayati
- b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu Ibu Resti
- c. Masyarakat Kota Batu yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional Mas Dani dan Mas Anugerah

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh secara tidak langsung yang berupa catatan, dokumen, peraturan tertulis ataupun arsip. Studi pustaka juga dapat dilakukan untuk memperoleh kerangka pemikiran dan landasan teori yang akan membantu penelitian yang ada dilokasi penelitian. Berkaitan dengan hal ini, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu buku pedoman pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional, renstra Dinas Pendidikan, undang-undang ataupun peraturan pemerintah laporan kegiatan Keaksaraan Fungsional dan data atau arsip yang terkait dengan fokus penelitian

program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan. Dengan tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Sugiyono dalam Anggit (2017:54) –pengumpulan data dilakukan pada natural kondisi yang alamiah (*setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Dengan jenis data yang ada maka peneliti menggunakan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua orang pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan mempunyai maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam yang menurut Sugiono dalam Anggit (2017:54). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Non

Formal Ibu Titing Nurhayati, Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Ibu Resti, Masyarakat Kota Batu yang buta huruf dan mengikuti program Keaksaraan Fungsional Mas Anugerah dan Mas Dani.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Anggit (2017:55) menyatakan bahwa – *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*—(melalui observasi, penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut). Menurut Sugiyono dalam Anggit (2017:55) menyatakan bahwa manfaat observasi sebagai berikut :

- a. Dengan observasi di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh.
- b. Dengan observasi maka diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.
- c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam

lingkungan itu, karena telah dianggap biasa karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.

Penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang ada di Dinas Kota Batu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi dan situs penelitian yang dianggap relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam Anggit (2017:56) menyatakan bahwa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam pengambilan gambar yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumentasi yang sudah dilakukan peneliti pada saat penelitian ialah merekam informasi yang diberikan narasumber pada saat proses wawancara serta dengan mengambil gambar yang berkaitan dengan kegiatan program kelompok Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yang mana peneliti harus siap

sebagai instrumen yang selanjutnya dapat langsung praktek ke lapangan. Menurut Sugiyono dalam Anggit (2017:56) kualitas instrumen menentukan kualitas hasil penelitian. Peneliti dalam metode penelitian kualitatif ini bertindak sebagai human instrumen yang mempunyai fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data atau informasi, pengumpulan data dan melakukan analisis terkait kesimpulan yang telah dibuat. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Peneliti dalam hal ini merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data utama yang dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk mengamati ataupun melihat secara langsung kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Data diperoleh yang paling utama berasal dari proses wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksana program Keaksaraan Fungsional dalam pemberdayaan masyarakat buta aksara di Kota Batu yang pengumpulan datanya ada di Dinas Pendidikan Kota Batu.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu pedoman yang digunakan pelaksanaan wawancara. Pedoman wawancara ini berisikan tentang daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan valid.

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan yang digunakan di lapangan untuk mencatat hasil dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan peneliti selama melaksanakan penelitian.

4. Alat perekam suara

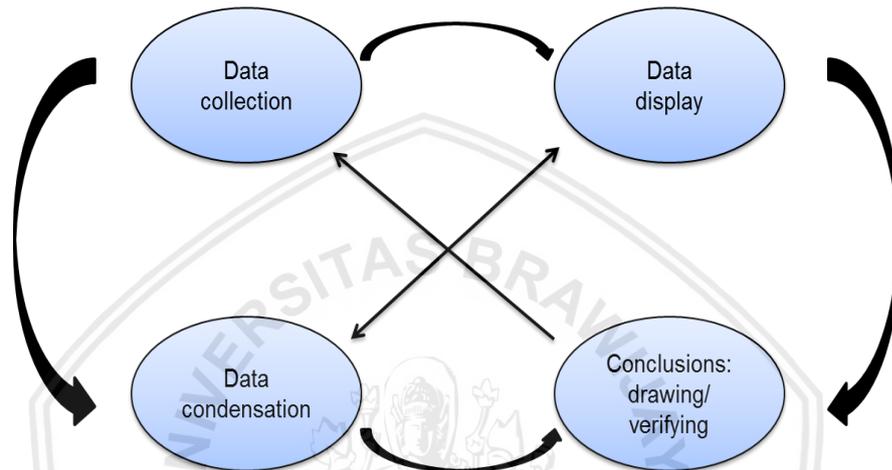
Alat perekam suara sebagai alat bantu untuk menyimpan bukti percakapan ketika sedang melakukan wawancara. Yang mana alat perekam ini adalah HP digunakan untuk mencari informasi dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89). Selanjutnya analisis data dalam penelitian kualitaitaf dilakukan sejak sebelum datang ke lapangan, selama berada di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91) mengemukakan bahwa setiap aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian

kualitatif juga dapat dilaksanakan aktivitas yaitu adanya *data collection*, *data display*, *data condensation* dan *conclusion drawing/verification*. Berikut ini merupakan gambaran tentang komponen-komponen data model interaktif dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3 : Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman dan Saldana (2014:14)

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dikatakan sebagai proses siklus dan interaktif, sehingga peneliti selama melakukan pengumpulan data harus mencari data, penyajian, sehingga penarikan kesimpulan selama waktu penelitiannya hingga data terkumpul. Pengumpulan data dilaksanakan untuk melengkapi penelitian yang ada dengan tujuan agar data yang diperoleh menjadi lebih kuat. Data yang telah diperoleh peneliti saat melakukan penelitian ialah informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak implementor Keaksaraan Fungsional yang ada di Kota Batu serta data yang menunjang program Keaksaraan Fungsional ini dapat terlaksana dengan baik di Kota Batu.

b. *Data Condensation*/Kondensasi Data

Data kondensasi dalam hal ini mengacu pada proses pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstrak, dan mengubah data yang muncul dalam sumber di lapangan, daftar wawancara, dokumen, dan bahan-bahan lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data yang lebih dapat dipercaya dan lebih lengkap. Data kondensasi dapat dikatakan menjadi proses transformasi berlanjut setelah lapangan selesai ataupun dapat dikatakan sampai laporan selesai. Data kondensasi adalah bentuk analisis yang mempertajam berbagai fokus, evaluasi, dan pengaturan data sedemikian rupa bahwa kesimpulan akhir yang bias ditarik dan diverifikasi.

c. *Data Display*/Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan dalam penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sebagainya. Melalui penyajian data ini data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berupa gambaran umum dari implementasi program Keaksaraan *Fungsional* di Kota Batu.

d. *Conclusion drawing*/penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang jika peneliti di lapangan. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

H. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dapat dikatakan dengan triangulasi. Teknik triangulasi ini yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbedah dalam penelitian kualitatif Moleong dalam Anggit (2017:58) . sedangkan teknik pemeriksaan data triangulasi dengan metode menurut Moleong dalam Anggit (2017:58) terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Penggunaan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Menurut Lincoln dalam Anggit (2017:58) “triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori”.

Penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti telah menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan informasi yang telah diberikan oleh narasumber yang diperoleh dari pegawai dinas Pendidikan Kota Batu, kepala bidang Pendidikan non formal, ketua atau pengelola pkbm dan masyarakat yang mengikuti Keaksaraan Fungsional.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Wilayah Kota Batu yang terletak didataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, samapai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama Batu mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota dingin ini di Jawa Timur. (Sumber <http://website.batukota.go.id>).

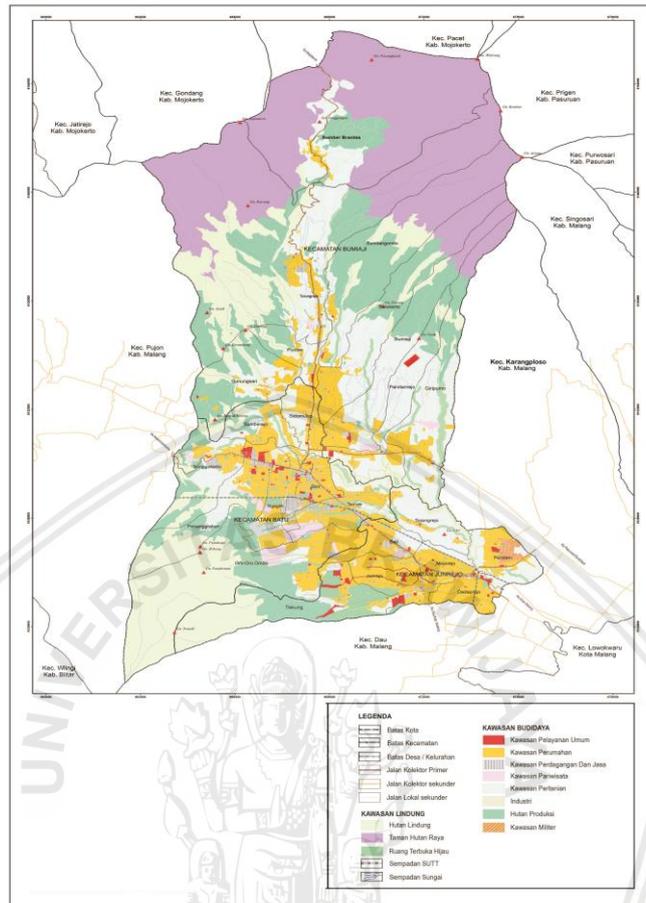
Panorama alam indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain juga wisatawan domestic dan mancanegara untuk mengunjungi dan menikmati Kota Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik sendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Kota Batu berkembang menjadi tujuan daerah wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat peristirahatan dan akhirnya yang bermukim di Kota Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan dari orang Belanda atau semasa pemerintahan Belanda itu pun masih berbekas. Begitu kagumnya orang Belanda atas keindahan dan keelokan Kota Batu, sehingga Bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Kota Batu dengan sebuah Negara di Eropa yaitu Switzerland dan memeberikan predikat sebagai *–De Klein Switzerland–* atau Swis kecil di Pulau Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada masa penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Kota Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai *The Father Foundation of Indonesia* yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah perang kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta, Kota Batu. (Sumber <http://website.batukota.go.id>).

Kota Batu merupakan daerah otonom baru di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2004. Kota Batu sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang yaitu pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 atau disebut dengan SSPW 1 Malang Utara. Pada tahun

2010 Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji dan terdiri dari 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT (*sumber: Batu Dalam Angka 2011*).

b. Geografis

Kota Batu dalam kondisi geografisnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi bagian lebih luas dan daerah daratan. Luas secara keseluruhan kawasan Kota Batu adalah sekitar 19.908,27 ha atau 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Jika dilihat dari segi astronomi, Kota Batu terletak pada posisi 122, 57 Bujur Timur dan 7,44,8,26, Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Batu sebagai berikut:



Gambar 3: Peta Kota Batu

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Batas Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Batas Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- 3) Batas Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- 4) Batas Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Kota Batu dilihat secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau. Endapan tersebut biasanya disebut dengan endapan epiklastik dan endapan tiroklastik. Dengan struktur geologis

tersebut, Kota Batu memiliki empat jenis tanah yang berupa lahan yang paling subur dengan luas 6.231,12 Ha. Dari 6,231,12 Ha terbagi menjadi lahan tanah yang memiliki kesuburan 3.026,37 Ha dan sisanya merupakan lahan tanah yang kurang subur dan memiliki kandungan kapur, dan jenis tanah latosol. Informasi geologis tersebut menggambarkan bahwa Kota Batu memiliki wilayah yang kandungan tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian. Jenis tanahnya terbentuk dari endapan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Batu. Mata pencaharian dari penduduk Kota Batu sebagian besar didominasi dari sector pertanian. (*sumber: Batu Dalam Angka 2011*).

Kota Batu merupakan salah satu daerah pegunungan yang berhawa dingin dengan suhu udara mencapai 21,3 derajat Celcius dan 34 derajat Celcius. Wilayah Kota Batu secara umum adalah daerah perbukitan dan pegunungan. Terdapat tiga gunung, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.399 meter). (*sumber: <http://www.eastjava.com/tourism/batu/ina/about.html>*).

Kota Batu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak sekali dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan panorama alamnya. Ketersediaan sumber mata air di Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota. Ketersediaan sumber mata air cukup potensial, dimana mata air tersebut dikonsumsi oleh penduduk Kota Batu itu sendiri dan sekitarnya. Kota Batu sampai saat ini

telah di inventarasi sebanyak 83 sumber mata air yang masih produktif dan selama ini digunakan oleh beberapa PDAM daerah terdekat untuk mengairi wilayahnya yaitu PDAM unit Kota Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

c. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi Kota Batu 2012-2017

“Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan”

Ditunjang oleh Pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya yaitu alam, manusia dan budaya yang tanggung diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreaif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (*sumber: <http://website.batukota.go.id>*).

2) Misi Kota Batu Tahun 2012-2017

- a) Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
- b) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- c) Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
- d) Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
- e) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan
- f) Peningkatan Kualitas Kesehatan
- g) Pengembangan Insfrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

- h) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- i) Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis dan Demokratis
- j) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Batu

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Batu

1) Visi

Visi Pembangunan Kota Batu Yang Ingin diwujudkan pada Periode 2016-2021 adalah :

“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

“ (Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2018-2022)

2) Misi

Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Batu Tahun 2018-2022 tersebut dirumuskan melalui lima misi pembangunan yaitu:

- a) Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, religius dan berbudaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

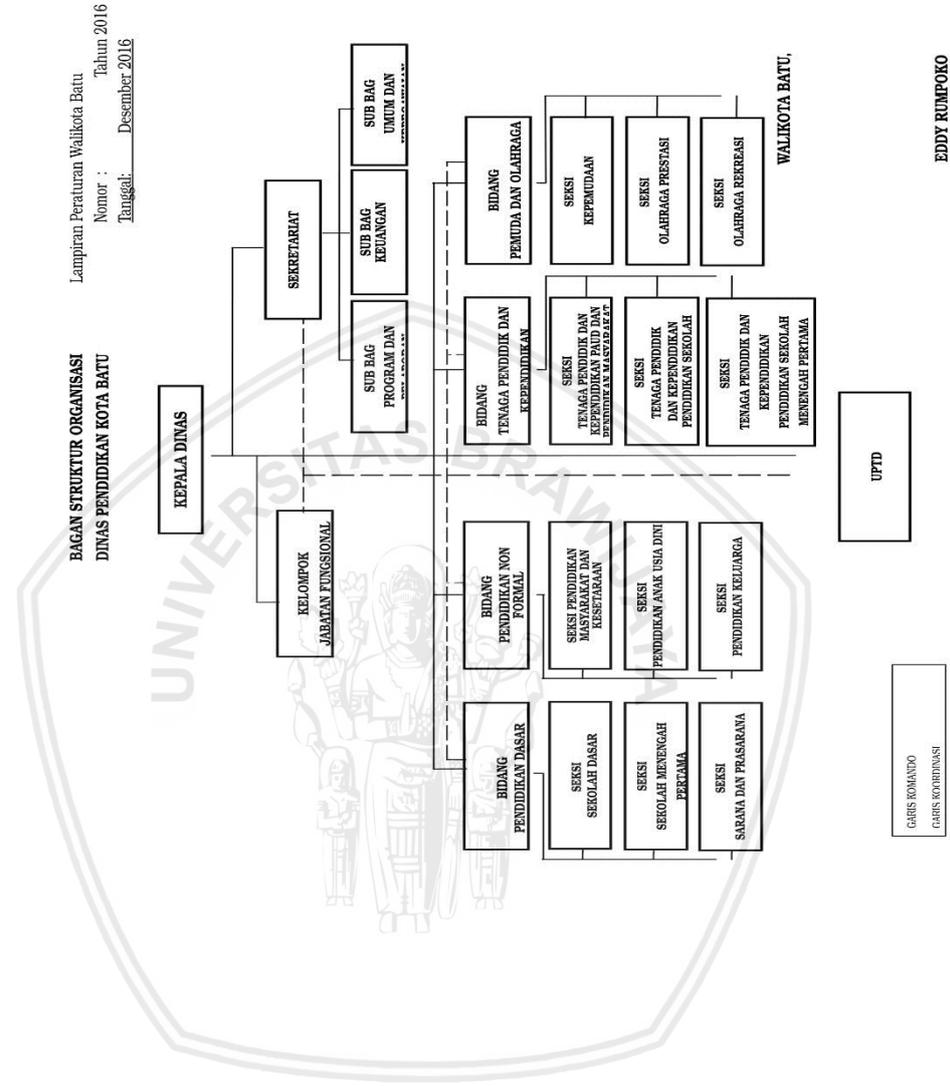
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
- c) Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- e) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
(Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2018-2022)

b. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sekretaris;
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

- a) Kepala Bidang Pendidikan Dasar Seksi Sekolah Dasar
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
- 4) Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia
 - c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - d) Seksi Pendidikan Keluarga
- 5) Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - b) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidik Usia Dini dan Pendidik Masyarakat
 - c) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar
 - d) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
 - b) Seksi Kepemudaan
 - c) Seksi Olahraga Prestasi
 - d) Seksi Olahraga Rekreasi



Gambar 4: Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2018-2022

c. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b) pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian
- d) pengelolaan administrasi perlengkapan
- e) pengelolaan urusan rumah tangga
- f) pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi
- g) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data urusan pendidikan
- h) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan
- i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- j) pengelolaan kearsipan Dinas
- k) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana

- l) pengelolaan administrasi keuangan, dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dasar.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) program bidang pendidikan dasar
 - b) penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif setiap tahun pada bidang pendidikan dasar
 - c) pembinaan bidang urusan pendidikan dasar
 - d) pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain bagi pengembangan sekolah dan penuntasan wajib belajar
 - e) pengendalian tata kelola sarana dan prasarana pendidikan dasar
 - f) perumusan rekomendasi perizinan SMP baru dan perpanjangan izin operasionalisasi pembentukan lembaga pendidikan SMP
 - g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang;
- dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakannya Bidang Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perencanaan program bidang pendidikan non formal
- b) penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dan pendidikan keluarga
- c) pengendalian pembinaan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dan pendidikan keluarga
- d) pengendalian tata kelola prasarana dan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dan pendidikan keluarga
- e) penyusunan rekomendasi izin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan lembaga pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keluarga
- f) pengendalian mutu pendidikan, lembaga pendidikan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan non formal
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang; dan

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5) Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perencanaan program bidang tenaga pendidik dan kependidikan
- b) penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar
- c) penyusunan analisis pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan
- d) pembinaan sistem informasi manajemen dan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan
- e) penyusunan analisis pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar sesuai kewenangannya
- f) pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar sesuai kewenangannya
- g) pengkajian pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan

pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar sesuai kewenangannya selain karena alasan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

h) pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga dan kependidikan

i) pengendalian sistem sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan pendidikan dasar sesuai kewenangannya

j) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang; dan

k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

6) Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) perencanaan program bidang pemuda dan olahraga

b) pengendalian data informasi bidang pemuda dan olahraga

c) pengendalian pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, dan hukum;

- d) pengendalian pembinaan pemuda dalam peningkatan Imtaq dan Iptek, kapasitas moral dan intelektual, dan kemandirian ekonomi
- e) pengendalian pendampingan kegiatan kepemudaan
- f) pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda
- g) pengendalian pembinaan organisasi kepemudaan
- h) pengendalian pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional
- i) pengendalian pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah
- j) pengendalian tata kelola sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
- k) pengendalian pembinaan organisasi kepramukaan daerah
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

Program Keaksaraan Fungsional adalah salah satu kegiatan pendidikan nonformal yang ditujukan untuk anggota masyarakat buta huruf. Pembelajaran Keaksaraan Fungsional, masyarakat buta huruf akan diberikan pembelajaran dalam menguasai dan menggunakan keterampilan

menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Program Keaksaraan Fungsional dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberantas buta huruf di bumi Indonesia. Program Keaksaraan Fungsional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sasaran program Keaksaraan Fungsional sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah kelompok masyarakat usia produktif yaitu usia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Pembelajaran Keaksaraan Fungsional diharapkan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat dalam hal melek huruf, angka dan bahasa.

Organisasi pelaksana program Keaksaraan Fungsional adalah Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya bidang pendidikan nonformal. Program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu sudah mulai dilaksanakan dari tahun 2017-2019. Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti, tim penggerak PKK, kepala Desa, dan warga masyarakat.

Model implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara di Dinas Pendidikan Kota Batu ini menggunakan model Korten yang dikutip Tarigan (2002: 12) yang terdiri dari unsur program (kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran), organisasi pelaksana (kesesuaian antara program dengan

organisasi pelaksana), dan kelompok sasaran (kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana). Penyajian datanya sebagai berikut :

a. Program

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pendidikan, maka kehidupan manusia akan terpuruk dan tertinggal karena kurangnya pengetahuan dalam berbagai hal. Pemerintah berusaha meningkatkan pendidikan di Indonesia baik melalui pendidikan formal maupun nonformal yang diharapkan mampu meningkatkan dan mengangkat derajat manusia dari keterpurukan, juga sebagai sarana pemberdayaan dalam kehidupan manusia guna menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut Kota Batu melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Kota Batu khususnya yang masih buta huruf. Adapun program yang dilakukan yaitu Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), dari dua Program tersebut terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran dan masyarakat yang selesai mengikuti program akan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dan Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L).

Tabel Kegiatan Keaksaraan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu

NO	Jenis Kegiatan	Jumlah Warga Belajar 2017-	Jumlah yang Mendapatkan
----	----------------	----------------------------	-------------------------

		2018	SUKMA
1	1. Membaca 2. Menulis 3. Berhitung	87 Peserta	87 Peserta

Sumber: Olahan Peneliti Sendiri

Tabel Kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri Dinas Pendidikan Kota Batu

NO	Jenis Kegiatan	Jumlah Warga Belajar 2017-2018	Jumlah yang mendapatkan SUKMA-L
1	1. Membuat Pupuk Kompos 2. Praktek Memasak 3. Praktek Kerajinan Tangan DLL.	87 Peserta	87 Peserta

Sumber: Olahan Peneliti Sendiri

Program Keaksaraan Fungsional ini diterima baik oleh masyarakat Kota Batu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titing selaku Staf Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu, sebagai berikut:

“Senang sekali karena mereka mendapatkan keterampilannya bahkan kadang-kadang ada yang curang juga, ada masyarakat yang sudah bisa membaca tetapi

karena tertarik dengan keterampilannya mereka ngakunya ngakunya tidak bisa membaca. orang buta aksara kan pada umumnya mereka tidak bisa tanda tangan tapi mereka sudah ada yang bisa.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Mas Dani selaku penduduk masyarakat Kota Batu yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional berpendapat tentang program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Menurut saya sangat bagus bisa mendapat keterampilan dan membantu mas buat yang putus sekolah biar kehidupan kedepan lebih cerah.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan penuturan Ibu Titing dan Mas Dani diatas merupakan kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran. Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program yakni program Keaksaraan Fungsional dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (masyarakat Kota Batu) dapat meningkat pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah.



Gambar 5: Hasil Karya Keterampilan Masyarakat Buta Huruf
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu berpendapat bahwa:

“Keaksaraan Fungsional adalah merupakan lanjutan dari Program Keaksaraan Dasar yang merupakan salah satu dari program Pemerintah yang bertujuan untuk memberantas buta huruf yang masih ada di bumi Indonesia. Kota batu juga merupakan salah satu daerah dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2010 Kota Batu di seluruh kecamatan masih ada masyarakat yang buta huruf namun presentase sangat kecil sekali dibanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Batu. Tujuan daripada Pemerintah melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional adalah untuk memberikan keterampilan lanjutan yang akan

diberikan kepada masyarakat yang telah menempuh kegiatan Keaksaraan Dasar (Pemberantasan Buta huruf).” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Titing sebagai kepala bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Keaksaraan Fungsional kan sasarannya orang dewasa. Tujuannya adalah untuk menambah keterampilan buat masyarakat buta huruf. Keterampilannya itu dibuat dalam tulisan aksara yaitu untuk belajar membaca sesuai dengan konsep-konsep yang sudah di siapkan.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan pendapat Ibu Resti dan Ibu Titing. Tujuan diadakannya program Keaksaraan Fungsional ini adalah untuk memberantas masyarakat yang buta huruf. Pemerintah juga bertujuan melaksanakan program Keaksaraan Fungsional untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat khususnya yang telah menempuh kegiatan Keaksaraan Dasar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat but huruf sehingga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangkah meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ada beberapa target atau sasaran yang diinginkan untuk turut ikut andil dalam pelaksanaan program ini, dimana sasaran itu adalah masyarakat yang masih buta huruf dan masyarakat usia produktif. Hal ini seperti

yang diutarakan Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Yang menjadi kelompok sasaran program Keaksaraan Fungsional adalah kelompok Masyarakat usia produktif yaitu usia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Ini dimaksudkan agar pada kelompok ini selain mereka bisa melek huruf, angka dan bahasa mereka diharapkan agar dapat pembelajaran baca, tulis dan hitung mereka juga dibekali dengan ketrampilan yang bisa dijadikan bekal untuk menjadi mata pencaharian yang nantinya akan bisa memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan keluarga.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan Ibu Titing selaku Kepala bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Sasarannya kepada masyarakat yang belum bisa membaca, siapapun yang belum bisa membaca, dan rata-rata di batu ini usia diatas 15 sampai 59 tahun. Jadi nanti kita kotak-kotakan pembelajaran keaksaraan fungsional sesuai dengan minat masyarakat” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Sesuai dengan pendapat Ibu Resti dan Ibu Titing diatas. Sasaran dari pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional adalah kelompok masyarakat yang masih usia produktif dari umur 15-59 tahun. Harapan yang di inginkan adalah mereka mau turut andil dalam pelaksanaan program ini agar mereka bisa melek huruf, angka, bahasa dan bisa membaca bahkan menulis serta dapat mendapatkan keterampilan untuk menjadi bekal mencari mata pencaharian dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan dengan harapan tidak selesai begitu saja, tetapi banyak harapan dan cita-cita yang diinginkan misalnya mereka bisa membaca, berhitung, berbahasa Indonesia dengan baik atau mempunyai keterampilan untuk dijadikan mata pencaharian atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas pendidikan Kota Batu yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Program Keaksaraan fungsional adalah salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah lewat pendidikan non formal, dengan harapan masyarakat yang menjadi warga belajar pada program ini mereka bisa lebih melek huruf, angka dan bahasa serta adanya ketrampilan yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi mereka yang belum mempunyai mata pencaharian. Sehingga dengan keterampilan yang dimiliki tersebut masyarakat yang tadinya buta huruf bisa mendapatkan penghasilan dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan tentunya program ini harus ditindaklanjuti dengan program-program pendidikan non formal lainnya.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa yang di ungkapkan mas Anugerah selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Harapannya saya bisa pintar mas, dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan saya juga akan mengajak teman-teman yang lain yang putus sekolah agar mereka mau ikut belajar juga seperti saya.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan penjelasan Ibu Resti dan Mas Anugerah diatas, bahwa setelah mengikuti program ini harapannya mereka bisa

meningkatkan pengetahuan mereka atau mempunyai keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan mata pencaharian. Program ini juga diharapkan tidak selesai begitu saja tetapi masyarakat yang mengikuti program ini harus ditindaklanjuti untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan program-program nonformal lainnya seperti sekolah kejar paket.

Menurut Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu mengatakan:

“Secara garis besar program Keaksaraan Fungsional pada awalnya diambil dari kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di kalangan masyarakat bawah, didaerah terpencil atau jauh dari jangkauan. Dan dengan program ini memang diharapkan oleh Pemerintah untuk bisa mengangkat masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. “ (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hasil wawancara dengan Mas Anugerah selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional juga mengatakan sebagai berikut:

“Iya mas sangat sesuai dengan kebutuhan saya, karena setelah belajar saya bisa menghitung, bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, dan mengasah pikiran lebih maju.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Sesuai dengan pendapat Ibu Resti dan Mas Anugerah

diatas. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini sudah sesuai dengan kebutuan kelompok sasaran yaitu masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan dan memberantas masyarakat yang buta

huruf. Masyarakat mengalami perubahan pengetahuan dengan adanya program Keaksaraan Fungsional ini.

Dampak dari Implementasi Program Keaksaraan Fungsional terhadap kelompok sasaran terbukti dari meningkatnya pengetahuan masyarakat buta huruf di Kota Batu. Masyarakat yang awalnya benar-benar buta huruf sudah mengalami peningkatan setelah mengikuti program Keaksaraan Fungsional dan mereka juga mendapatkan keterampilan tambahan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat bapak Ibu Titing selaku kepala Bidang pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Manfaatnya mereka merasa mendapat keterampilan tambahan, berarti mereka mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan. Misalnya dalam pertanian mereka belum tau bagaimana bercocok tanam yang baik, cara membuat kompos yang baik, tapi setelah mereka mengimplementasikan keterampilannya mereka bisa tau oh hasilnya bagus.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mas Anugerah selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Dampaknya sama saya bagus mas, karena saya bisa mengalami perubahan, agak pintar-pintar dikit” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dampak yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sangat baik. Adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat merupakan suatu keberhasilan dalam melaksanakan program

Keaksaraan Fungsional. Hal tersebut merupakan kesesuaian antara program Keaksaraan Fungsional sesuai dengan kelompok sasaran masyarakat buta huruf Kota Batu dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.



Gambar 6: Pembelajaran Keterampilan Kegiatan Memasak

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Tabel 3:

Daftar Nama Peserta Program Keaksaraan Fungsional Tahun 2017 dan 2018

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN
1	SUPIAH	Giripurno	2017
2	NUR HANIK	Giripurno	2017
3	KASIATI	Giripurno	2017
4	DEWI	Giripurno	2017
5	SENITI	Giripurno	2017
6	UMI KULSUM	Giripurno	2017
7	JUNTIK	Giripurno	2017
8	MASELIK	Giripurno	2017
9	ARUMI	Giripurno	2017
10	NANIK	Giripurno	2017
11	KUMI AYAH	Giripurno	2017
12	SIAMAH	Giripurno	2017

13	FITRIA	Giripurno	2017
14	SITI NUR INSYAFIK	Giripurno	2017
15	JUMA ATI	Giripurno	2017
16	SUMARTI	Giripurno	2017
17	MUNTIANAH	Giripurno	2017
18	UMI KASANAH	Giripurno	2017
19	PARNI	Giripurno	2017
20	NGATIANI	Giripurno	2017
21	SUTILAH	Giripurno	2017
22	RUBIATI	Giripurno	2017
23	SUMIATI	Giripurno	2017
24	SUMILAH	Giripurno	2017
25	MINAH	Giripurno	2017
26	KASTI	Junrejo	2017
27	SUTIANINGSIH	Junrejo	2017
28	MINARTI	Junrejo	2017
29	KANTI	Junrejo	2017
30	SUJIAH	Junrejo	2017
31	PONITA	Junrejo	2017
32	SRIRAHAYU	Junrejo	2017
33	GINAH	Junrejo	2017
34	SUMIATI	Junrejo	2017
35	PATIMAH	Junrejo	2017
36	KASENI	Junrejo	2017
37	SURIYAH	Junrejo	2017
38	TAMSIH	Junrejo	2017
39	SUMIAH	Junrejo	2017
40	RANTIYEM	Junrejo	2017
41	KASIYAH	Junrejo	2017
42	WIJATUN	Junrejo	2017
43	SARICARI	RT 03 RW 04	2018
44	ENDANG R.	RT 03 RW 04	2018
45	WINARSIH	RT 03 RW 05	2018
46	NUR HIDAYAH	RT 03 RW 05	2018
47	GINEM	RT 03 RW 04	2018
48	JUMANI	RT 03 RW 04	2018
49	MARKATI	RT 03 RW 04	2018
50	SOLIKAH	RT 03 RW 04	2018
51	MARKUNI	RT 03 RW 04	2018
52	SENAH	RT 03 RW 04	2018
53	SUHARTIK	RT 03 RW 05	2018
54	SUWARIYEM	RT 03 RW 05	2018
55	SUDARSIH	RT 03 RW 04	2018
56	MISTIN	RT 03 RW 04	2018

57	SRIMULIANAH	RT 03 RW 05	2018
58	RUBI	RT 03 RW 04	2018
59	KHUSNUL	RT 03 RW 04	2018
60	KHUTIBAH	RT 03 RW 04	2018
61	SUKENI	RT 03 RW 04	2018
62	FITRIANINGSIH	RT 03 RW 04	2018
63	YULIATI	RT 03 RW 04	2018
64	SARMIATI	RT 04 RW 02	2018
65	JUMAI	RT 03 RW 01	2018
66	WARTINAH	RT 02 RW 01	2018
67	SITI KOMARIAH	RT 01 RW 02	2018
68	SUMARTIK	RT 03 RW 03	2018
69	WASITAH	RT 01 RW 03	2018
70	SIAMWATI	RT 02 RW 02	2018
71	SUMANTINI	RT 01 RW 01	2018
72	MURIYANTI	RT 01 RW 01	2018
73	SAROPAH	RT 03 RW 02	2018
74	MAYA RUKANAH	RT 03 RW 02	2018
75	KASIATI	RT 03 RW 04	2018
76	SRIMUNAH	RT 03 RW 06	2018
77	JINI	RT 02 RW 06	2018
78	TITIN	RT 02 RW 03	2018
79	ENA	RT 02 RW 06	2018
80	RIYATI	RT 01 RW 01	2018
81	SUMAKMI	RT 03 RW 06	2018
82	TOMIMAH	RT 01 RW 01	2018
83	ANANUR	RT 01 RW 06	2018
84	NGANTIN	RT 01 RW 06	2018
85	INDRAWATI	RT 03 RW 02	2018
86	LILIK W.	RT 02 RW 06	2018
87	PARNI	RT 03 RW 02	2018

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

b. Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu tidak bisa terlepas dari peran Dinas Pendidikan Kota Batu. Peran Dinas Pendidikan adalah bertindak sebagai Pembina dan penanggung jawab. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan dan bekerja sama dengan beberapa pihak luar untuk membantu dan menyukseskan

pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini. Pihak-pihak yang di libatkan dalam kegiatan ini adalah seperti tim penggerak PKK, Kepala Desa dan BPS Kota Batu, tujuannya sebagai tempat mencari data dan verifikasi data, juga sebagai pemantau masyarakat yang buta huruf, selain itu tim PKK dan Kepala Desa sebagai penggerak utama kepada masyarakat. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam kegiatan Keaksaraan Fungsional adalah Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, Kepala Desa/ Kepala Dusun dan warga masyarakat usia produktif antara 15 tahun sampai dengan 59 tahun. Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah Bidang Pendidikan Non Formal karena Pendidikan Keaksaraan Fungsional adalah merupakan salah satu program dari Pendidikan Masyarakat. Tim Penggerak PKK dalam hal ini juga dilibatkan dengan tujuan setelah program Pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk selanjutnya yang memantau adalah Tim Penggerak Desa karena sebagian besar dari peserta Keaksaraan Fungsional adalah para perempuan. Kepala Desa/Kepala Dusun adalah motor penggerak pertama dari kegiatan Keaksaraan Fungsional. Karena peserta program adalah warga masyarakat yang berada di desa atau dusun yang ditunjuk.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Sedangkan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau kemarin yang kita libatkan, kita kerjasama dengan PKK dengan harapan mereka juga sebagai pendamping jadi kalau selesai mereka juga mendampingi mereka terus dalam bentuk keterampilannya, ya kerjasama kita dengan PKK.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Sesuai dengan pendapat Ibu Resti dan Ibu Titing diatas. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan beberapa pihak dari luar untuk membantu menyukseskan program Keaksa praan Fungsional ini. Pihak-pihak yang dilibatkan seperti tim penggerak PKK, Kepala Desa, BPS Kota Batu. Tujuan melibatkan beberapa pihak lain yaitu sebagai verifikasi data, sebagai motivator dan penggerak masyarakat, selain itu sebagai pemantau masyarakat yang sudah mengikuti program Keaksaraan Fungsional agar mengembangkan keterampilan yang mereka miliki sebagai mata pencaharian mereka atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu Dinas Pendidikan melakukan beberapa tahap atau proses sebelum pelaksanaan program. Tahap yang dilakukan ialah seperti Verifikasi data ke BPS sesuai dengan desa yang akan menjadi sasaran, setelah melakukan verifikasi data maka masyarakat yang menjadi sasaran akan ditawarkan untuk ikut pelaksanaan program. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Batu membuat persiapan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dan menyiapkan fasilitas yang akan digunakan. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang pertama identifikasi data BPS sensus Tahun 2010 ke desa

yang ditunjuk. Data diberikan kepada Kepala Desa untuk diklarifikasi kebenarannya. Jika benar, data akan ditindaklanjuti kepada nama-nama yang tersebut pada data BPS. Jika Berkenan, nama yang tersebut pada data tersebut ditawarkan untuk mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional. Dinas Pendidikan mendata, peserta yang akan mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional. Membuat segala persiapan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional, termasuk bersurat pada desa, persiapan tempat pelaksanaan kegiatan, Tutor kegiatan dan segala sesuatunya. Mengundang secara resmi para peserta, Kepala Desa/Kepala Dusun dan Tim Penggerak PKK Desa/Dusun. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Khususnya Bidang Pendidikan Non Formal.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal tersebut juga diungkapkan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota batu sebagai berikut:

“Prosesnya kita merekrut data, datanya kita bekerja sama dengan BPS dari situ kita rekap dulu terus kita verifikasi setelah kita dapat datanya kami masuk ke desanya desa sasaran untuk mengklarifikasi apakah betul warga masyarakat desa ini? dan namanya ini? dan belum bisa membaca. na untuk proses pembelajarannya itu ya sesuai yang saya bilang kita kelompokkan sesuai minat mereka, misalnya pertanian kita ajari dunia pertanian atau kita ajari membuat kerajinan tangan atau memasak yang senang dengan memasak. Kita pernah ajari membuat telur asin atau makanan khas.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan pendapat Ibu Resti dan Ibu Titing diatas. Sebelum pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional, Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan beberapa tahap sebelum melakukan pelaksanaan program. Tahap-tahap tersebut seperti melakukan

verifikasi data masyarakat atau Desa sasaran melalui BPS Kota Batu dan melakukan koordinasi kepada kepada Kepla Desa sesuai Desa sasaran. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dari pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional bisa tercapai. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini, masyarakat akan diberikan materi pelajaran atau keterampilan sesuai dengan minat mereka dengan tujuan agar mereka bisa mengembangkan keterampilan itu untuk digunakan sebagai modal mendapatkan penghasilan.



Gambar 7: Proses Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Selain itu masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional diberikan fasilitas yang memadai dan mendukung pelaksanaan program ini. Fasilitas yang dibeikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka mendapatkan fasilitas yang diberikan Dinas Pendidikan baik dalam bentuk barang, materi bahkan ilmu. Masyarakat yang mengikuti program ini akan di bimbing oleh tenaga

pengajar atau tutor, juga diberikan fasilitas sesuai keterampilan mereka seperti alat-alat pertanian dan alat memasak bahkan masyarakat diberi transport selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Adapun fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu terkait dengan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional adalah seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program antara lain honorarium tenaga pengajar atau Tutor Keaksaraan, biaya makan minum selama kegiatan berlangsung, biaya bahan praktek yang dibutuhkan terkait dengan ketrampilan yang diberikan, alat tulis Kantor, bahan pembelajaran materi berupa handout masing-masing peserta, bantuan transport selama kegiatan berlangsung untuk para peserta.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kalau fasilitas itu kita berikan sesuai keterampilan yang mereka lakukan, misalnya keterampilan memasak kita siapkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Juga kita berikan makan minum selama pembelajaran bahkan biaya transport kita berikan misalnya buat bayar ojek selama pembelajaran.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan penuturan Ibu Resti dan Bu Titing diatas. Masyarakat yang mengikuti program ini mendapatkan fasilitas yang mencukupi dan mendukung pelaksanaan program. selain mereka mendapatkan fasilitas yang layak masyarakat juga diberi transport

selama mengikuti kegiatan itu. Masyarakat juga di ajari oleh tenaga pengajar atau Tutor yang berkompeten di bidang itu sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan ilmu dan keterampilan setelah mengikuti program Keaksaraan Fungsional.

Selain hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Batu juga memberikan fasilitas berupa dana. Dana tersebut digunakan untuk membantu menunjang pelaksanaan program. Dana ini berikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai yang di ungkapkan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kalau program Keaksaraan ini sudah berjalan selama lima tahun, dan dana yang kita berikan khusus tahun 2019 ini Rp. 46.206.720,00” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Adapun kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional adalah bervariasi sesuai dengan budget yang telah ditetapkan pada DPA Dinas Pendidikan Kota Batu pada tahun anggaran yang ditetapkan. Tahun Anggaran 2018 dana kurang lebih sebesar Rp. 62.850,00. Tahun Anggaran 2019 dana kurang lebih sebesar Rp. 46.206.720,00.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan dana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan Implementasi Program Keaksaraan Fungsional untuk menuntaskan masyarakat yang buta huruf. Hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian *antara program Keaksaraan Fungsional dengan organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu dalam implementasi program Keaksaraan Fungsional dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.*



Gambar 8: Proses Pembelajaran di Ruang
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Tabel 4:

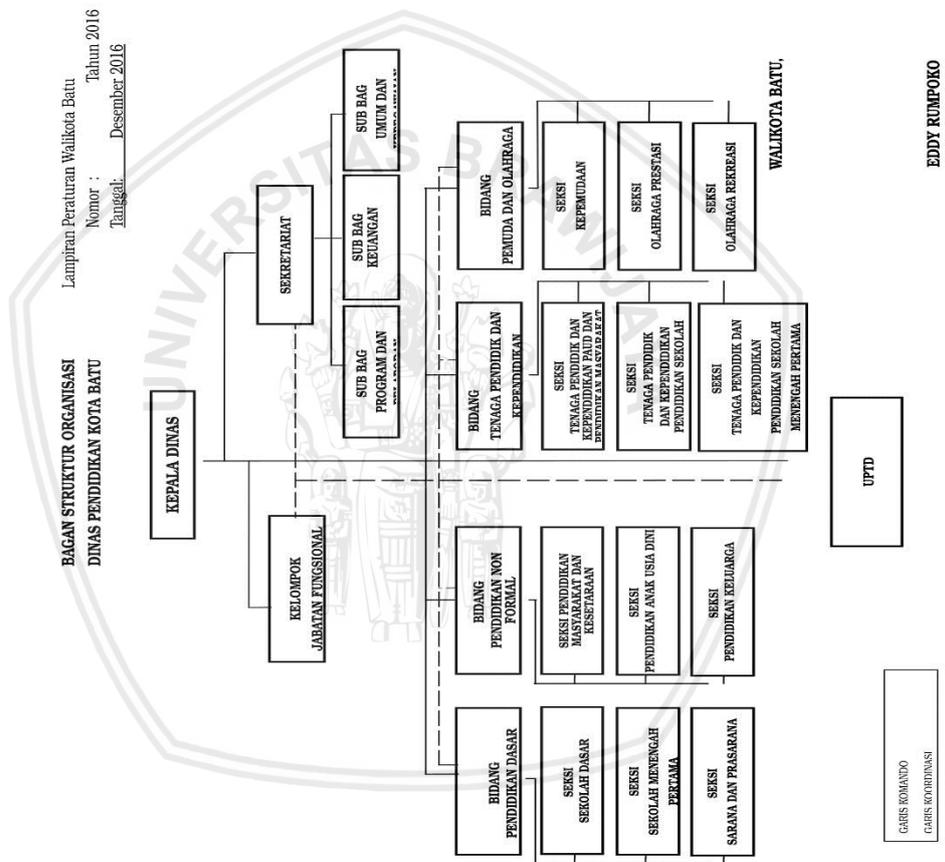
**Anggaran Biaya Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional
Tahun 2019**

NO	BARANG	BIAYA
1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)	Rp. 1.000.000,00
2	Belanja Jasa Kantor	Rp. 14.000.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 945000,00
4	Belanja Makan Minum	Rp. 4.962.500,00
5	Belanja Pakaian Kerja	Rp. 3.102.000,00
6	Belanja Bahan/Material	Rp. 9.697.220,00
7	Belanja Transportasi dan Akomodasi	Rp. 12.500.000,00

Jumlah	Rp. 46.206.720,00
---------------	--------------------------

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Adapun struktur organisasi pelaksana program Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:



Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2018-2022

c. **Kelompok Sasaran/Pemanfaat**

Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional ini sangat membutuhkan peran Dinas Pendidikan Kota Batu. Selain peran Dinas Pendidikan Kota Batu juga membutuhkan peran dan kerjasama dari masyarakat Kota Batu, khususnya PKK, Kepala Desa atau Kepala Dusun. Hal itu dikarenakan untuk menjalin kerjasama agar masyarakat yang buta huruf mempunyai keinginan dan semangat untuk mengikuti program Keaksaraan Fungsional, adanya dorongan dari Kepala Desa dan tim penggerak PKK akan membuat masyarakat untuk semangat dan mempunyai keinginan untuk mengikuti program. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Batu dan tim penggerak PKK juga memfasilitasi keterampilan masyarakat setelah selesai melaksanakan program, seperti mengikutkan masyarakat dalam pameran untuk menjual hasil karya mereka. Hal itu seperti yang diungkapkan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal dalam wawancara sebagai berikut:

“Na tahun kemarin tahun 2018, kita kerjasama dengan PKK dan Kepala Desa agar masyarakat yang sudah mengikuti pembelajaran kita beri kesempatan untuk ikut pameran di Balai Kota, waktu itu pameran dalam rangka ulang tahun PKK kita juga ada kegiatan yaitu publikasi pendidikan nonformal dalam bentuk pameran mereka kita beri kesempatan, kita beri tendah dan sebagainya untuk di isi dan memamerkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu mereka mempunyai keterampilan untuk di jadikan penghasilan.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Tentu saja ada kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat baik itu organisasi yang ada dimasyarakat (Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Kepala Dusun) dan juga PKBM.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan pendapat Ibu Titing dan Ibu Resti diatas, Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Masyarakat yang dilibatkan adalah Kepala Desa dan tim penggerak PKK Desa itu sendiri. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat maka akan memperlancar pelaksanaan program, selain itu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat khususnya Kepala Desa dan PKK akan membantu Dinas Pendidikan Kota Batu untuk memantau masyarakat yang mengikuti program agar tidak berhenti tetapi diberi fasilitasi untuk menjadikan keterampilan mereka untuk menjadi sumber pendapatan melalui pameran atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Dinas Pendidikan Kota Batu juga melakukan kerjasama dalam hal promosi atau sosialisasi program melalui kepala Desa dan tim Penggerak PKK. Hal ini dilakukan agar program Keaksaraan Fungsional yang akan dilaksanakan bisa diketahui masyarakat khususnya masyarakat yang buta huruf sesuai dengan sasaran program. Sosialisasi ini diberitahukan kepada Desa sasaran melalui Kepala Desa dan PKK agar dilanjutkan kepada masyarakat berkaitan dengan akan

dilaksanakannya program Keaksaraan Fungsional. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Ibu Titing selaku kepala Bidang Pendidikan nonformal sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi kita lewat PKK, stake holder yang paling sering kita ajak adalah PKK, karena PKK itu mereka lebih tau potensi-potensi wilayah mereka masing-masing sesuai sasaran program kita.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung. Namun sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Dinas Pendidikan koordinasi terlebih dahulu dengan desa sasaran dan Tim Penggerak Desa sasaran. Sehingga nantinya bisa membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan Pendapat Ibu Titing dan Ibu Resti diatas. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat khususnya dalam hal promosi atau sosialisasi program kepada masyarakat. Stake holder utama yang menjadi sasaran Dinas Pendidikan adalah Kepala Desa dan tim Penggerak PKK, karena Kepala Desa dan tim Penggerak PKK lebih tahu terhadap keadaan atau potensi wilayahNya untuk dijadikan sebagai sasaran program.

Sosialisasi ini dilakukan dengan harapan agar program yang akan dilaksanakan bisa tersampaikan dan diketahui oleh masyarakat.

Selain melakukan sosialisasi, kontribusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu dilakukan dalam berbagai hal, seperti terjun langsung ke lapangan untuk memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Dinas Pendidikan Kota Batu juga berusaha agar masyarakat yang mengikuti program ini bisa memiliki keterampilan, selain keterampilan masyarakat juga diharapkan mampu menguasai materi yang diberikan seperti membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan benar. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kontribusi yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu kepada kelompok sasaran ini adalah pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai baca tulis, menghitung, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta pemberian ketrampilan praktis yang dapat digunakan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Dan diharapkan dari keterampilan yang diberikan secara sederhana dapat digunakan sebagai keterampilan tambahan yang bisa dan mampu memperbaiki peningkatan kesejahteraan keluarga, disamping keterampilan tersebut sebagai implementasi dari pembelajaran yang diberikan. Semua pembelajaran dibimbing oleh Tutor Keaksaraan dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Selain materi , materi pembelajaran dalam bentuk buku kita berikan, kalau keterampilannya bahan-bahannya semua dari Dinas.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan Penjelasan Ibu Resti dan Ibu Titing diatas. Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini Dinas Pendidikan Kota Batu berusaha memberikan kontribusi dengan baik, kontribusi yang diberikan berupa dalam hal materi juga dalam hal kebutuhan alat-alat yang diperlukan.



Gambar 9: Pembelajaran Keterampilan Membuat Madu

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional ini sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat maka program ini tidak akan terlaksana dengan baik. Masyarakat buta aksara di Kota Batu juga diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti program ini dan mengembangkan dirinya melalui keterampilan yang didapatkan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

a. Faktor Pendukung

1). Adanya Dukungan Dari Perangkat Desa

Masyarakat merupakan salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu program. Untuk menyukkseskan pelaksanaan program ini tidak terlepas dari dukungan perangkat desa sendiri, seperti kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Kepala Desa dalam hal pelaksanaan teknis, misalnya penyediaan tempat dan perijinan yang diberikan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kota Batu untuk pelaksanaan program di Desa itu. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukung itu dari Kepala Desa dan masyarakatnya sendiri, jadi Kepala Desa harus memotivasi warganya agar warganya mau ikut pembelajaran. Juga sebagai tempat perijinan tempat untuk melaksanakan program Keaksaraan Fungsional.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Tim Penggerak PKK dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan misalnya, dengan memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan, membantu mengidentifikasi calon peserta.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor pendukung pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional adalah Masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program ini sangat mendukung, misalnya dalam hal perijinan tempat dan Kepala Desa dan tim penggerak PKK sebagai tempat melakukan verifikasi data masyarakat yang akan mengikuti pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional.

2). Fasilitas Yang Memadai Dalam Pelaksanaan Program

Masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional ini mendapatkan fasilitas yang memadai dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Fasilitas yang diberikan dengan tujuan dapat menunjang pelaksanaan program dengan baik, dan masyarakat yang mengikuti program dapat merasa nyaman. Fasilitas yang diberikan

dalam berupa dana dan alat-alat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan mas Dani selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Saya dikasih alat-alat tulis mas, kaya pulpen, dan buku. Kita juga dikasih sesuai kebutuhan kita mas.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Juga diungkapkan oleh mas Anugerah selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Ya semuanya dikasi, seperti alat-alat tulis. Yang kita gunakan semuanya dikasih.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Dari penjelasan diatas, masyarakat yang mengikuti program ini diberi fasilitas dalam pelaksanaan program, semua fasilitas yang digunakan di tanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk alat-alat tulis seperti buku, pulpen dan alat-alat yang lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan program.

b. Faktor Penghambat

1). Kurangnya Rasa Percaya Diri Masyarakat Yang Buta Huruf Khususnya Laki-Laki

Kurang percaya diri atau adanya rasa malu merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu. Adanya rasa malu dalam mengikuti program karena jenis kelamin. Beberapa masyarakat di Kota Batu yang berjenis kelamin laki-laki malu mengikuti program Keaksaraan

Fungsional karena berbagai alasan. Alasan yang diberikan seperti sibuk dalam bekerja bahkan ada juga yang malu karena ketidak tahuan membaca. Hal tersebut sesuai yang diutarahkan oleh Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Dari calon peserta yang berjenis kelamin laki-laki selalu tidak mau untuk mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional dikarenakan malu dan mereka beralasan bahwa sibuk bekerja walaupun kegiatan dilaksanakan diluar jam kerja.. juga terbatasnya biaya yang dianggarkan sehingga kegiatan hanya bisa dijalankan dengan waktu yang cukup singkat, dan padat.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2019)

Hal serupa juga diutarahkan oleh Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

"Keaksaraan Fungsional itu kan buat laki-laki dan perempuan. Na laki-lakinya itu gengsi, mereka tidak bisa membaca tapi mereka tidak mau mengikuti pembeajaran. Jadi faktor penghambatnya itu kadang-kadang mereka malu mengakui kalau dia tidak bisa membaca, baik laki-laki maupun perempuan tapi lebih parah laki-laki. (Wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan penjelasan Ibu Resti dan Ibu Titing diatas. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional karena adanya rasa malu. Sebagian masyarakat buta huruf yang berjenis kelamin laki-laki malu mengakui bahwa mereka tidak bisa membaca dan beralasan karena pekerjaan meskipun pekerjaan itu bisa dilakukan diluar waktu pelaksanaan proram.

2). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk komitmen dalam mengikuti pelaksanaan program. Masyarakat terkadang tidak masuk mengikuti pembelajaran program karena berbagai macam alasan. Rata-rata anggota masyarakat yang mengikuti program bekerja sebagai petani di sawa dan di ladang, hal tersebut yang membuat mereka terbengkalai mengikuti program karena kesibukan di dalam bekerja. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan mas Angerah selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Saya kerja di kebun mas jadi kadang bentrok, dan tanaman saya kesian di ladang kalau ditinggal”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Hal serupa juga diungkapkan mas Dani selaku masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional sebagai berikut:

“Ya kalau ada kerjaan saya ijin mas dan kadang kalau hujan juga saya tidak masuk.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas kurangnya kesadaran dan komitmen masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan program. Kurangnya komitmen masyarakat karena berbagai alasan, salah satu faktor penghambat karena rata-rata masyarakat yang mengikuti program bekerja sebagai petani sehingga mereka enggan meninggalkan tanaman mereka dan bentrok saat pelaksanaan program. selain itu cuaca juga merupakan salah satu faktor penghambat bagi mereka, saat

terjadi musim hujan seringkali mereka tidak masuk mengikuti pelaksanaan program.

C. Analisis Data

David Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa program dapat dikatakan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan model diatas dapat dipahami bahwa kinerja suatu program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan jika tidak sesuai dengan ketiga unsur implementasi program. Seperti penjelasan dari ketiga pola diatas, apabila suatu program yang ingin disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output tidak dapat di manfaatkan. Jika organisasi yang melaksanakan program tidak mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya sesuai yang diinginkan, maka organisasi tersebut tidak dapat menyampaikan program dengan baik. Atau, jika

syarat yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana tidak dapat terpenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok yang menjadi sasaran tidak mendapatkan output program. Sehingga dari ketiga unsur implementasi program diatas harus diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

a. Program

Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program . Pertama, kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran (pemanfaat) yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok (pemanfaat). Dari unsur pertama dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suatu program tidak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika tidak terdapat kesesuaian antara program dengan kelompok yang menjadi sasaran dalam sebuah implementasi program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran program, maka jelas output tidak

dapat dimanfaatkan. Berdasarkan hasil wawancara, antara program Keaksaraan Fungsional dan kelompok sasaran yaitu masyarakat sudah saling berkaitan dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional.

Program Keaksaraan Fungsional mempunyai dua tahap kegiatan yaitu, Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Keaksaraan Dasar adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan benar. Sedangkan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) yang dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangkah peningkatan taraf hidupnya (www.paud-dikmas.go.id). Prinsipnya kedua kegiatan tersebut adalah program Keaksaraan Fungsional (KF) yang telah dikembangkan sejak tahun 1995 sampai saat ini. Adapun yang menjadi sasaran program Keaksaraan Fungsional adalah masyarakat buta huruf dengan usia produktif umur 15-59 tahun.

Program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Program ini dibentuk sebagai usaha pemerintah untuk memberantas masyarakat buta huruf khususnya di Kota Batu itu

sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tahun 2019, Pendidikan dinyatakan berhasil apabila:

1. Minimal 80% peserta didik program mampu meningkatkan kompetensi keberaksaraannya yang meliputi kompetensi mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) dasar.
2. Minimal 80% peserta didik Keaksaraan Dasar yang sudah menguasai SKK, memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).
3. Minimal 80% peserta didik Keaksaraan Dasar mampu meningkatkan kecakapan hidup dengan memiliki keterampilan praktis sebagai dasar untuk berusaha atau bermata pencaharian untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Menurut Alamsyah dalam Hadi dkk (2010: 61) Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya pembangunan masyarakat, dengan tujuan mengurangi/ menghilangkan posisi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi struktur sosial,

ekonomi, dan politik. Demikian halnya Nasirin dalam Hadi dkk (2009: 98) mengatakan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dimana dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Program Keaksaraan Fungsional ini dibuat dengan tujuan dapat memberdayakan dan mengurangi jumlah masyarakat yang masih buta huruf. Masyarakat yang buta huruf sangat perlu untuk di berdayakan agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Soebianto dalam Lila (2015: 102) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara dan menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakatnya. Sejalan dengan hal diatas Theresia dalam Lila (2015: 102) mendefinisikan pemberdayaan yaitu upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-

pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelolah kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya.

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini sudah memberikan manfaat baik bagi masyarakat Kota Batu. Antusias masyarakat juga sangat tinggi karena program Keaksaraan Fungsional ini dapat memberikan keterampilan kepada mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu pada wawancara 24 April 2019 bahwa respon masyarakat baik terkait program Keaksaraan Fungsional. Masyarakat sangat senang dengan adanya program ini karena mereka tertarik dengan keterampilannya. Bahkan beberapa masyarakat yang sudah bisa membaca mengaku tidak bisa membaca karena ketertarikan mereka dengan keterampilan yang akan diajarkan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Mazmanian dan Sabatier dalam Agung (2018: 125) implementasi ialah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministresikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Keberhasilan dari pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini terhadap masyarakat salah satu contohnya adalah masyarakat dapat memperoleh keterampilan. Sesuai dengan

wawancara 24 April 2019 dengan Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu manfaatnya masyarakat mendapatkan keterampilan tambahan, mereka mengimplementasikan apa yang kita ajarkan. Masyarakat diberi keterampilan seperti bagaimana bercocok tanam dengan baik, atau membuat pupuk kompos dan masyarakat memperoleh hasilnya. Mas Dani salah satu masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional mengungkapkan bahwa program ini sangat bermanfaat masyarakat bisa mendapatkan keterampilan tambahan dan membantu masyarakat yang putus Sekolah. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sumodiningrat dalam Sulton (2008:9) yang mengatakan bahwa terdapat lima indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat, antara lain: (1) berkurangnya jumlah penduduk miskin. (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. (3) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. (4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. (5) serta meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan

yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Sumodiningrat diatas dengan proses Implementasi Program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu sudah sesuai, karena dengan adanya Program Keaksaraan Fungsional, masyarakat buta huruf dapat meningkatkan taraf kehidupannya melalui keterampilan yang mereka peroleh selama pelaksanaan program. Adanya keterampilan yang diperoleh selama pembelajaran dapat digunakan sebagai sumber penghasilan untuk meningkatkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang diperoleh selain membaca, menulis dan berbahasa Indonesia dengan baik, masyarakat di ajarkan keterampilan yang lain seperti membuat madu, keterampilan memasak, membuat pupuk dan keterampilan yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu yang menjadi wujud pemberdayaan masyarakat buta huruf. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mau berkembang dalam hal pengetahuan. Selain itu, pelaksanaan program ini memberikan keuntungan dan dampak bagi masyarakat buta huruf di Kota Batu. Perwujudan keuntungan dari program ini adalah adanya keterampilan yang diberikan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai mata pencaharian.

b. Organisasi Pelaksana

Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Tujuan unsur kedua adalah antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan jika tidak terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana implementasi program. Hal tersebut bisa terjadi apabila organisasi yang melaksanakan program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang ditetapkan, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Usman dalam Agung (2018: 127) menyebutkan berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa unsur yang melaksanakan program merupakan unsur yang paling penting dalam proses implementasi program.

Organisasi pelaksana dalam program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu adalah Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya Bidang Pendidikan Non Formal. Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai organisasi pelaksana berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional.

Peran Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya Bidang Pendidikan Nonformal adalah sebagai penanggungjawab, Pembina dan pemberi fasilitas atau dana. Peran dalam pemberian fasilitas sesuai yang diungkapkan Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu dalam wawancara 23 April 2019 bahwa semua fasilitas dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program semua ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Fasilitas yang diberikan selain dalam bentuk barang, masyarakat juga diberikan tenaga pengajar/tutor, biaya makan minum selama kegiatan berlangsung, biaya bahan praktek terkait keterampilan yang diberikan, alat tulis dan bahan pembelajaran materi, bahkan transport selama pembelajaran diberikan kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Syukur dalam Agung (2018:128), proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Selain itu organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan beberapa tahapan sebelum pelaksanaan program. Tahap-tahap yang dilakukan seperti indentifikasi data ke BPS sesuai dengan desa yang akan menjadi sasaran. Kemudian data diberikan kepada Kepala Desa untuk diklarifikasi kebenarannya. Jika data itu

benar akan ditindaklanjuti ke BPS dan nama-nama tersebut akan ditawarkan untuk mengikuti program. seperti yang diungkapkan oleh ibu Resti dalam wawancara pada tanggal 23 April 2019 yaitu: Proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang pertama identifikasi data BPS sensus Tahun 2010 ke desa yang ditunjuk. Data diberikan kepada Kepala Desa untuk diklarifikasi kebenarannya. Jika benar, data akan ditindaklanjuti kepada nama-nama yang tersebut pada data BPS. Jika Berkenan, nama yang tersebut pada data tersebut ditawarkan untuk mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional. Dinas Pendidikan mendata, peserta yang akan mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional. Membuat segala persiapan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional, termasuk bersurat pada desa, persiapan tempat pelaksanaan kegiatan, Tutor kegiatan dan segala sesuatunya. Mengundang secara resmi para peserta, Kepala Desa/Kepala Dusun dan Tim Penggerak PKK Desa/Dusun. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Khususnya Bidang Pendidikan Non Formal.

Menurut Sajogyo (1987: 98) Buta huruf dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah. Pemerintah harus berupaya untuk menekan anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah yang

diakibatkan oleh masalah kemiskinan, maupun yang diakibatkan oleh jauh dari layanan pendidikan.

- b. Membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran. Membuat cara-cara yang baru yang asyik agar peserta didik tidak bosan untuk belajar dan menjaga kemampuan beraksara bagi peserta didik.
- c. Adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah harus mempunyai niat yang baik, sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas buta huruf untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- d. Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf bukan saja tugas pemerintah semata tapi itu tugas kita semua selaku generasi penerus bangsa.

Selain yang diatas, peran Dinas Pendidikan Kota Batu juga yaitu memberikan dana duntuk pelaksanaan program keaksaraan Fungsional ini. Dana yang diberikan dipergunakan sealama kegiatan Keaksaraan Fungsional berlangsung dengan tujuan memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program. seperti yang dikatakan oleh Ibu Resti selaku seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu dalam wawancara 23 April 2019 bahwa dana yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan

bervariasi sesuai dengan budget yang telah ditetapkan, untuk tahun 2018 dana yang diberikan sebesar Rp. 62.850.00 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 46.206.720.00. Selain dana yang diberikan, Dinas Pendidikan Kota Batu juga melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Tim Penggerak PKK, dan melibatkan BPS Kota Batu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam hal administrasi dan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang kesesuaian antara organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu dengan program Keaksaraan Fungsional. Disini Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Peran tersebut anatara lain sebagai penanggungjawab, Pembina, pemberi fasilitas dan dana. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tujuan melancarkan dan mencapai keberhasilan program ini.

c. Kelompok Sasaran

Korten dalam Tarigan (2000:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Unsur ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara apa yang ditetapkan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran

program. berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian salah satunya antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana.

Hal ini disebabkan apabila syarat yang telah ditetapkan oleh organisasi yang melaksanakan program tidak terpenuhi oleh kelompok yang menjadi sasaran, maka kelompok yang menjadi sasaran tidak mendapatkan output program. Menurut teori Korten dari ketiga unsur dalam pelaksanaan program yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran pada program Keaksaraan Fungsional ini adalah masyarakat Kota Batu yang buta huruf. Dimana masyarakat Kota Batu yang buta huruf harus ikut berperan dalam pelaksanaan program ini agar mendapat keuntungan dari adanya program Keaksaraan Fungsional.

Bentuk kesesuaian antara kelompok sasaran yaitu masyarakat dengan organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu adalah adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Batu dengan masyarakat Kota Batu. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Batu juga mengikutsertakan masyarakat dalam implementasi program Keaksaraan Fungsional. Masyarakat harus berperan dan mampu bekerja sama dalam implementasi program ini. Peran dan kerjasama masyarakat dibutuhkan karena pelaksanaan program ini dapat menguntungkan masyarakat sendiri. Hal ini sesuai yang diungkapkan

Syukur dalam Agung (2018: 131), proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pendapat Syukur diatas menjelaskan tentang suatu proses dalam sebuah implementasi harus melibatkan masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa dampak atau hasil dari sebuah program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan yang dirasakan dalam hidupnya. Dalam implementasi program harus ada organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelolah pelaksana dan pengawasan proses implementasi. Sedangkan menurut Sujarwo (2008:7-9) menjelaskan langkah-langkah perencanaan program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yaitu:

- a. Membentuk struktur dan memperkuat unsur-unsur kelompok.
- b. Melakukan pengukuran awal kemampuan keaksaraan dan kebutuhan belajar.
- c. Mengidentifikasi tema-tema lokal dan sumber daya belajar setempat.
- d. Melakukan kontrak belajar.
- e. Menyusun program pembelajaran.

- f. Memilih pendekatan pembelajaran.
- g. Memilih metode pembelajaran.
- h. Menyiapkan sumber belajar.
- i. Menyiapkan media dan alat pembelajaran.
- j. Menyiapkan instrument administrasi, monitoring dan evaluasi.
- k. Menentukan alokasi waktu.
- l. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat Sujarwo diatas, dapat dipahami bahwa untuk mencapai hasil pembelajaran Keaksaraan Fungsional yang maksimal, maka kita harus melakukan perencanaan dan menyiapkan beberapa langkah sebelum melakukan pembelajaran. Menyusun langkah-langkah dan melakukan perencanaan tersebut dengan tujuan program atau pembelajaran yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat, khususnya kepada warga belajar buta aksara. Langkah-langkah diatas juga dapat mendukung tercapainya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan masyarakat Kota Batu untuk bersama-sama meyukseskan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Dinas Pendidikan Kota Batu ingin agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan melalui program Keaksaraan Fungsional ini. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki

masyarakat maka mereka mempunyai yang bisa untuk dijual dari hasil mereka sendiri.

Bentuk perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan Kepala Desa, tim penggerak PKK, dan Badan Pusat Statistik Kota Batu. Keterlibatan masyarakat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Restii selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu dalam wawancara 23 April 2019 bahwa dalam pelaksanaan program ini Dinas Pendidikan Kota Batu melibatkan masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, tim penggerak PKK dan PKBM sebagai tempat koordinasi pelaksanaan program.

Dengan adanya keterampilan yang diperoleh, maka akan sangat membantu masyarakat buta huruf untuk bangkit dari himpitan ekonomi dan sosial dimana mereka memperoleh penghasilan melalui keterampilan yang mereka miliki dan mampu berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan dan masyarakat dimana mereka beradah.

Usaha Dinas Pendidikan Kota Batu dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tidak hanya itu. Dinas Pendidikan Kota Batu juga memfasilitasi masyarakat yang telah selesai mengikuti program Keaksaraan Fungsional untuk diikutkan dalam pameran-pameran di Kota Batu, keikutsertaan masyarakat dalam pameran adalah memasarkan dan menjual hasil

karya dan keterampilan mereka yang di dapatkan selama pelaksanaan program Keaksan Fungsional. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu dalam wawancara 24 April 2019 bahwa Dinas Pendidikan Kota Batu bekerjasama dengan Kepala Desa dan tim penggerak PKK agar masyarakat diikutsertakan dalam pameran seperti mengikuti pameran dalam rangka ulang tahun PKK dan pameran publikasi Pendidikan nonformal, masyarakat kita ikutkan dalam pameran.

Selain melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan kontribusi dalam berbagai hal, seperti melakukan survey atau terjun langsung ke lapangan untuk memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Dinas Pendidikan Kota Batu juga berusaha dan mengharapkan agar masyarakat yang mengikuti program bisa memperoleh keterampilan dan mampu menguasai materi yang diberikan seperti membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan benar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Resti dalam wawancara pada tanggal 23 April 2019 bahwa Kontribusi yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu kepada kelompok sasaran ini adalah pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai baca tulis, menghitung, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta pemberian ketrampilan praktis yang dapat digunakan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Dan

diharapkan dari keterampilan yang diberikan secara sederhana dapat digunakan sebagai keterampilan tambahan yang bisa dan mampu memperbaiki peningkatan kesejahteraan keluarga, disamping keterampilan tersebut sebagai implementasi dari pembelajaran yang diberikan. Semua pembelajaran dibimbing oleh Tutor Keaksaraan dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini sendiri membuat antusias masyarakat tinggi. Hal tersebut terbukti dari tanggapan masyarakat. Hal itu karena adanya Keaksaraan Fungsional ini sangat membantu dan menguntungkan masyarakat dari segi aspek ekonomi karena masyarakat dapat menjual hasil karya mereka yang didapatkan selama mengikuti program. Program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan karena sesuai kebutuhan masyarakat sendiri dan hasilnya juga untuk mereka sendiri dengan bantuan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Batu.

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dari penjelasan diatas yaitu kerjasama antara organisasi pelaksana (Dinas Pendidikan Kota Batu) dengan kelompok sasaran (masyarakat buta huruf Kota Batu). Kerjasama tersebut antara lain pembinaan dan fasilitasi dalam menjual hasil karya mereka sebagai mata pencaharian.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

a. Faktor Pendukung

1). Adanya Dukungan Dari Perangkat Desa

Perangkat desa atau masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan suatu program, masyarakat dibutuhkan untuk membantu dalam pelaksanaan program. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Isbandi dalam Rizal (2014:4) bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dan beberapa bentuk Partisipasi Masyarakat meliputi : Partisipasi dalam bentuk tenaga, Partisipasi dalam bentuk dana, Partisipasi dalam bentuk material, Partisipasi dalam bentuk informasi.

Pendapat diatas menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk dana, partisipasi dalam bentuk material, partisipasi dalam bentuk informasi. Demi keberhasilan sebuah implementasi dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Fungsi dari masyarakat sangat penting, masyarakat membantu dan mendukung proses pelaksanaan program seperti untuk tempat koordinasi, memperoleh informasi, tenaga, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan kerjasama dengan masyarakat sasaran program. Adapun masyarakat yang dilibatkan adalah seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tim penggerak PKK. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat maka pelaksanaan program akan terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi dari masyarakat sendiri yang menjadi Desa sasaran.

Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu menyebutkan bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program adalah masyarakatnya sendiri seperti kerjasama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tim penggerak PKK dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan program dan sebagai tempat untuk melakukan koordinasi. Sesuai dengan penjelasan diatas, perangkat desa atau masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program. Peran dan perangkat desa dan masyarakat sangat mendukung, seperti dalam hal perijinan tempat pelaksanaan program dan membantu dalam hal verifikasi data masyarakat buta huruf.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu program yang akan diimplementasikan dapat di pengaruhi dengan adanya kerjasama dengan masyarakat atau perangkat desa. Sumberdaya masyarakat sangat berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan implementasi program. Masyarakat merupakan pendukung pertama dalam pelaksanaan

program karena, mereka yang lebih tahu tentang kondisi di masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat maka pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan baik.

2). Fasilitas Yang Memadai Dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan suatu program tidak akan berjalan dengan baik tanpa di bantu dengan sebuah fasilitas. Fasilitas sangat sangat mendukung dalam pengmplementasian sebuah program. Menurut Mulyasa (2004: 17) menyatakan: Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung,ruang kelas,meja kursi,serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman,kebun,taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan tersebut merupakan prasarana pendidikan.

Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kota Batu mengatakan bahwa seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah semua ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Batu, fasilitas

yang diberikan berupa dana dan semua alat-alat yang digunakan saat pelaksanaan program. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional mendapat fasilitas yang cukup memadai yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Tujuan dari fasilitas ini agar dapat menunjang proses pembelajaran dengan baik dan masyarakat dapat merasa nyaman. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat berupa alat-alat tulis, peralatan untuk praktek keterampilan, bahkan berupa uang tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas, berhasilnya pelaksanaan sebuah program sangat dipengaruhi dengan adanya sebuah fasilitas yang lengkap. Fasilitas merupakan suatu pendukung dalam pelaksanaan sebuah program yang dimana fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan. Sepeti di Kota Batu sendiri bahwa fasiltas yang diberikan untuk mendukung memperoleh sebuah keterampilan sesuai yang diminati.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Rasa Percaya Diri Masyarakat Yang Buta Huruf Khususnya Laki-Laki

Kurangnya rasa percaya diri dari masyarakat untuk mengakui bahwa mereka buta huruf merupakan penghambat dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Dalam dunia Pendidikan perbedaan gender sangatlah tidak menjadi masalah dalam menuntuk ilmu. Pendidikan tidak memandang jenis kelamin, usia, bahkan status

sosial, yang penting ada kesadaran dan kemauan dari individu dalam menuntut ilmu. Namun dalam implementasinya masih ada beberapa masyarakat yang malu karena faktor gender, seperti yang terjadi dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu. Beberapa dari masyarakat khususnya yang berjenis kelamin laki-laki malu dan enggan mengakui bahwa mereka masih buta huruf. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program.

Ibu Titing selaku Kepala Bidang Pendidikn nonformal Dinas Pendidikan Kota batu mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam implementasi program ini karena faktor gender. Program Keaksaraan Fungsional ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat yang buta huruf, namun dalam kenyataannya sebagian masyarakat yang yang berjenis kelamin laki-laki malu mengakui bahwa mereka masih belum bisa membaca atau buta huruf.

Adanya rasa malu atau kurang percaya diri dari masyarakat merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan program. Beberapa dari masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki masih kurang percaya diri bahkan malu mengakui bahwa mereka buta huruf. Selain rasa kurang percaya diri, ada juga masyarakat yang memberi alasan bahwa mereka sibuk bekerja di ladang.

Peristiwa diatas merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program atau pemberantasan masyarakat buta

huruf. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupannya. Jika masyarakat buta huruf terus melakukan hal tersebut maka mereka tidak akan berkembang dan memperoleh keterampilan untuk dijadikan sebagai pendapatan dan mengangkat derajat hidupnya.

2). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan

Islami dalam Agung (2018: 141) menjelaskan bahwa sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan salah satu diantaranya adalah respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah dan adanya kesadaran masyarakat untuk menerimanya. Kerena seperti apapun program tersebut ditujukan untuk masyarakat, apabila masyarakat tidak mau menerima dan sadar maka sebuah program tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya program ini merupakan salah satu penghambat pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional ini. Kesadaran beberapa masyarakat akan pentingnya program ini sudah sangat bagus namun ada juga beberapa masyarakat yang kesadarannya masih kurang.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program ini dirasa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Hal itu seperti yang dikatakan Ibu Resti selaku Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan nonformal Dinas

Pendidikan Kota Batu bahwa beberapa masyarakat beralasan bahwa mereka sibuk bekerja walaupun kegiatan dilaksanakan diluar jam kerja. Melihat hal diatas membuktikan bahwa kesadaran beberapa masyarakat belum sepenuhnya dan belum mengerti akan pentingnya program Keaksaraan Fungsional ini.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat yang mengikuti program seperti yang diungkapkan diatas, ada juga masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya program ini namun mereka belum bisa mengoptimalkan dan melanjutkan keterampilan dan pembelajaran yang telah diberikan. Hal ini terjadi karena kurangnya monitoring dan evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Sikap masyarakat yang kesadarannya masih kurang dan belum bisa menggunakan keterampilan yang didapatkan tentunya dapat menjadi hambatan dalam implementasi program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu.

Dari penjelasan diatas, kesadaran masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program ini tentunya dapat menjadi penghambat. Jika hal tersebut terus terjadi akan menyebabkan masyarakat yang buta huruf tidak mengalami perkembangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang

ditemui di lapangan. Kesimpulan tersebut akan dijelaskan melalui table dibawah ini:

Tabel 5:

Temuan Peneliti

Fokus Penelitian	Temuan Peneliti
a. Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu sudah berjalan selama 5 tahun. 2. Pelaksanaan program selama 5 tahun berjalan dengan baik. 3. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu khususnya masyarakat buta huruf. 4. Antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti program Keaksaraan Fungsional. 5. Keberhasilan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu adalah masyarakat memperoleh keterampilan untuk dijadikan sumber penghasilan.
b. Organisasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi pelaksana program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu adalah Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya bidang Pendidikan Non Fornal. 2. Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya bidang Pendidikan Non Formal penanggung jawab dan Pembina. 3. Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. 4. Dinas Pendidikan Kota Batu bekerja sama dengan perangkat desa yang menjadi sasaran program, seperti Kepala Desa, tim penggerak PKK, dan BPS Kota Batu. 5. Selain fasilitas, Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan dana kepada masyarakat dalam pelaksanaan program. untuk tahun 2018 dana yang diberikan sebesar Rp. 62.850.00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 46.206.720.00
c. Kelompok Sasaran/ Pemanfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi kelompok sasaran pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Kota Batu adalah masyarakat Kota Batu sendiri. 2. Masyarat sasaran adalah masyarakat yang belum

	bisa membaca yang berumur 15 tahun sampai dengan 59 tahun.
d. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	<p>Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan dari perangkat Desa yang menjadi kelompok sasaran program.2. Fasilitas yang cukup memadai dan mendukung dalam pelaksanaan program. <p>Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya rasa percaya diri dari masyarakat yang buta huruf khususnya laki-laki.2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

- a. Program

Program adalah bisa berasal dari adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Yang menjadi kelompok sasaran adalah masyarakat. Kesesuaian antara program Keaksaraan Fungsional adalah berbentuk tanggapan masyarakat terhadap program, dampak dari program kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Respon sebagian masyarakat Kota Batu dengan adanya program Keaksaraan Fungsional sangat baik, antusias masyarakat dengan program juga sangat tinggi. Hal tersebut terbukti banyak masyarakat yang mengaku buta huruf karena tertarik dengan keterampilan yang akan diajarkan. Dampak dari adanya program Keaksaraan Fungsional yaitu bisa menambah keterampilan kepada masyarakat yang buta huruf, dengan adanya hasil keterampilan maka bisa dijadikan sebagai penghasilan.

Dampak tersebut contohnya masyarakat bisa menjual hasil karya mereka yang dipelajari saat mengikuti pembelajaran.

b. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana dalam program Keaksaraan Fungsional adalah Dinas Pendidikan Kota Batu. Peran Dinas Pendidikan Kota Batu dalam program Keaksaraan Fungsional adalah penanggung jawab, dan pembina. Berhasilnya Implementasi Program Keaksaraan Fungsional karena beberapa strategi atau langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu seperti melakukan sosialisasi pada desa sasaran, bekerjasama dengan pihak lain seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tim penggerak PKK untuk melancarkan pelaksanaan program.

c. Kelompok Sasaran/Penerima manfaat

Implementasi program Keaksaraan Fungsional membutuhkan peran dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Masyarakat harus mampu melek huruf, angka, berbahasa yang baik, dan memiliki keterampilan agar memberi keuntungan bagi dirinya. Untuk mendapatkan keterampilan tersebut tentunya dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai organisasi pelaksana. Bantuan tersebut diantaranya memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan dan menyiapkan Tutor yang akan mengajar. Kemudian, Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan pelatihan kepada masyarakat.

Pelatihan tersebut seperti belajar membuat keterampilan pertanian, memasak dan keterampilan lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara.

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kota Batu bisa terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat setempat yang menjadi sasaran program, dalam hal ini masyarakat membantu dari perijinan tempat, juga tahap persiapan sampai selesainya program. Selanjutnya, faktor pendukung dari program Keaksaraan Fungsional ini adalah Fasilitas. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengikuti program semua ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Batu sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Contohnya alat tulis, peralatan-peralatan untuk membuat keterampilan .

b. Faktor Penghambat

Faktor Penhambat dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional adalah kesadaran masyarakat yang kurang. Sebagian masyarakat belum mengerti akan pentingnya dari pendidikan. Masih banyak masyarakat yang belum konsisten untuk mengikuti program, karena berbagai macam alasan. Seperti beberapa

masyarakat beralasan bahwa mereka seringkali tidak mengikuti pembelajaran karena bentrok dengan pekerjaan mereka di ladang padahal pelaksanaan program diluar jam kerja. Selanjutnya, faktor penghambat yang yang lain adalah adanya rasa kurang percaya diri dari masyarakat yang buta huruf. Beberapa anggota masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki merasa malu dan tidak mau mengakui bahwa mereka masih buta huruf, sehingga masyarakat yang buta huruf belum sepenuhnya mau mengikuti program ini khususnya laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi. Dinas Pendidikan Kota Batu sebaiknya bekerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi, karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa sendiri maka masyarakat buta huruf akan lebih cepat sadar akan pentingnya pendidikan, karena perangkat desa dianggap lebih dekat dan mengerti keadaan masyarakatnya sendiri. Masyarakat diberikan pencerahan akan dampak yang mereka akan alami ketika mereka tidak mempunyai pengetahuan apa-apa dan dampak yang akan mereka terima ketika mau mengikuti pendidikan non formal khususnya program Keaksaraan Fungsional.

2. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Batu bekerjasama dengan Dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Peternakan yang dapat membantu memberikan dan mengajarkan keterampilan kepada masyarakat khususnya masyarakat buta huruf yang berjenis kelamin laki-laki, karena dengan diajarinya masyarakat untuk bertani dan beternak maka masyarakat tidak merasa bosan dan mereka akan antusias mengikuti program karena sesuai dengan minat dan pekerjaan yang sedang mereka lakukan.
3. Meningkatkan peran dan usaha dari organisasi pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Batu perlu melakukan evaluasi saat Program Keaksaraan Fungsional telah selesai dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi maka Dinas Pendidikan Kota Batu dapat mengetahui tingkat keberhasilan program terhadap masyarakat khususnya keterampilan yang mereka terima saat pembelajaran, apakah keterampilan yang mereka terima saat pembelajaran sudah digunakan dengan baik untuk menjadi sumber penghasilan bagi dirinya atau masyarakat belum mengalami perubahan khususnya dalam hal ekonomi.
4. Masyarakat yang telah selesai mengikuti program Keaksaraan Fungsional dan masih umur produktif sebaiknya di arahkan dan diberikan pencerahan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal lainnya seperti sekolah kejar paket A, B, dan C

sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi dan mengurangi jumlah pengangguran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullhak, I. d. 2012. *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, I. R. 2008. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Ainur. 2016. *Partisipasi Masyarakat*. Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id> (diakses pada tanggal 27 November 2018).
- Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org> (diakses pada tanggal 17 November 2018).
- Aneta, A. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. Diakses melalui <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/132> (diakses pada tanggal 1 November 2018).
- Alamsyah. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Tangga Miskin*. Jurnal Administrasi Publik. Diakses melalui <https://media.neliti.com> (diakses pada tanggal 29 Mei 2019).
- Arikunto, S. 1998. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Data Masyarakat Buta Aksara Jawa Timur*. Online di <http://sp2016.bps.go.id> (diakses pada 28 Oktober 2018).
- Bawani, Steers, R. M. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Chadwik, A. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang.
- Dewi. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Mestopo Beragam.
- Dwidjowijoyo, R. N. 2006. *Kebijakan Public Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third Word*. New Jersey: Princeton University Press.



<http://bindikmas.kemdikbud.go.id/bindiktara/> (diakses pada tanggal 29 November 2018).

<http://paud-dikmas.kemendikbud.go.id> (diakses pada tanggal 28 November 2018).

<http://website.batukota.go.id> (diakses pada tanggal 27 Maret 2019)

Hamdi, M. 2014. *Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hogan. 1984. *Konsep dan Aplikasi*. Semarang: PT Bina Aksara

Indriana. 2014. *Sejarah PAUD*. Lampung: Universitas Lampung.

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesi Press.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 2017. *Panduan Penyelenggaraan dan Pembelajaran Pendidikan Multikeaksaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publications.

Mansyur. 2010. *Manajemen Pembiayaan Proyek*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Munadi, M. d. 2011. *Kebijakan Public di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mikkelsen. 2008. *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mazmanian. 2008. *Pengaruh Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Terhadap Prestasi Pendidikan*. Jakarta: Yudistira.

- Nasional, D. J. 2010. *Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Nasirin, Chairun. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang: INDO PRESS
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningtyas, Ratna, Anggit. 2017. *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mikin*. Malang: Fakultas Ilmu Adminstrai, Universitas Brawijaya.
- Priansa, S. d. 2008. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Prasetyo, Agung. 2018. *Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata*. Malang.: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rawita, I. S. 2013. *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Semesta.
- Rohman, A. 2012. *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sujarwo, Quraisy, H. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Diakses melalui https://www.academia.edu/27062596/Pemberdayaan_Masyarakat_Desa_Yang_Buta_Huruf (diakses pada tanggal 20 November 2018).
- Sajogyo. 1987. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Diakses melalui <https://docplayer.info> (diakses pada tanggal 29 Mei 2019).
- Soelaman. 1981. *Pendidikan Non Forml dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Offset Printing.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makasaar: Persadi.
- Shantini. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Alfabeta 1985. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

- Sukidin, Damai Darmadi. 2011. *Administrasi Publik*. Jakarta: Laksbang Pressindo Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryadi, A. 2006. *Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) Pendidikan Keaksaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Latifah. 2008. *Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional (KF)*. Diakses melalui <https://repository.ipb.ac.id>. (diakses pada tanggal 24 Juni 2019)
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Soebianto. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Mc Graw Hill.
- Suprayogi. 2012. *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda. PT Grafindo.
- Tarigan, d. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Yogyakarta: UGM.
- Theresia, Edwi. 20017. *Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id>. (diakses pada tanggal 27 November 2018).
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.
- Terry. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Ganesa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- www.dispendukcapil.com (diakses pada tanggal 29 maret 2019)

www.depdiknas.com (diakses pada tanggal 1 November 2018).

Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT: Bumi Aksara.



LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3171 /UN10.F03.11/PN/2019

Lampiran : Proposal

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batu
di Jl. Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313 Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Antonius Pappang
Alamat : Jl. Watugong no. 29
NIM : 155030901111021
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pendidikan
Judul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara
Lamanya : 29 hari (24 Maret – 21 April 2019)
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Maret 2019
a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik


Drs. Andy Feffa Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 000



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENDIDIKAN

Balaikota Among Tani Gedung A Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Telepon/Faksimile (0341) 511665
Web: <http://diredik.batukota.go.id>, e-mail: dindikkotabatu@gmail.com
Kota BATU 65313

Nomor : 421.9/ 3369/422.101/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Ijin Penelitian**

Batu, 16 Mei 2019
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Di
Malang

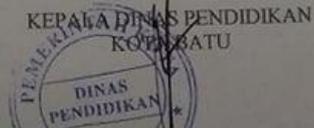
Menunjuk surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batu Nomor 072/0345/422.205/2019 tanggal 14 Maret 2019, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANTONIUS PAPPANG
NIM : 155030901111021
Jurusan : Administrasi Publik
Instansi : FIA/Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara
Data yang diperoleh :
- Implementasi Program Keaksaraan
- Faktor Pendukung dan penghambat
Waktu : 24 Maret 2019 s/d 21 April 2019

Demikian disampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. ENY RACHDUNINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199303 2 009





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani
 Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 14 Maret 2019

Nomor : 072/cg/45/422.205/2019
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
 Di -

Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 3171/UN10.F03.11/PN/2019 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANTONIUS PAPPANG
 NIM/NIP : 155030901141021
 Jurusan : Administrasi Publik
 Instansi : FIA/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara
 Data yang dicari : - Implementasi Program Keaksaraan
 - Faktor pendukung dan penghambat
 Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 24 Maret 2019 s/d 21 April 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. **WALIKOTA BATU**
 KEPALA KANTOR KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU



Dr. SANYOTO WIDAYAT, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19660717 198603 1 006

→ **Tembusan :**
 Yth Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang



KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU
Program	:	Pendidikan Non Formal
Hasil	:	- Terberantasnya masyarakat buta huruf
SKPD/Satker	:	Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu
Kegiatan	:	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dari warga belajar yang buta huruf
Jenis keluaran	:	Adanya ketrampilan khusus pada warga belajar masyarakat yang buta huruf pada usia produktif
Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Volume	:	25 orang Warga Belajar dari masyarakat / warga belajar usia produktif yang masih buta huruf

A. Latar Belakang

Bahwa di masyarakat tidak dapat dipungkiri masih ada warga masyarakat usia produktif yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Hal ini banyak penyebabnya diantaranya adalah orang tua yang berpendidikan rendah atau yang berpenghasilan rendah. Untuk itu Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal bermaksud untuk merangkul warga masyarakat yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan formal. Warga masyarakat yang putus sekolah tersebut dibenarkan pelatihan ketrampilan praktis yang dapat digunakan sebagai bekal untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga walaupun mereka tidak berpendidikan tinggi tapi mereka mampu untuk dapat berpenghasilan atau berwiraswasta.

B. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standart Isi Program Pendidikan Kesetaraan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

- a. Memberikan kesempatan pada warga belajar yang masih buta huruf pada usia produktif untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ketrampilan yang dipandu oleh narasumber
- b. Dengan ketrampilan yang dimiliki (ketrampilan membaca, menulis dan berhitung ataupun ketrampilan kecakapan hidup) diharapkan warga masyarakat tersebut dapat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat melakukan usaha dan dapat menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2) Tujuan Kegiatan

Memberi ketrampilan membaca dan menulis serta ketrampilan kecakapan hidup pada warga belajar yang buta huruf usia produktif sehingga disamping mengikuti pendidikan kesetaraan juga memperoleh ketrampilan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

D. Indikator Keluaran

Out put dari Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup adalah :

1. Diberikannya pembelajaran ketrampilan membaca dan menulis serta berhitung dan ketrampilan kecakapan hidup pada warga belajar yang mengikuti kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan
2. Terciptanya ketrampilan kecakapan hidup, pengetahuan dan sikap warga belajar yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keaksaraan .

3. Warga Belajar diharapkan mampu untuk menciptakan suatu usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga

E. Penerima Manfaat

1. Dalam Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan akan dirasakan oleh warga belajar yang mengikuti kegiatan tersebut.
2. Jumlah warga belajar adalah 25 (Duapuluh lima) orang

F. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 10 kali pertemuan dengan memberikan materi pembelajaran membaca, menulis, berhitung serta ketrampilan kecakapan Hidup yang diberikan oleh para nara sumber. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua warga belajar untuk berpraktek secara langsung bersama narasumber. Disamping mereka mendapatkan teori pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran secara teori mereka bersama-sama melaksanakan praktek sesuai dengan teori yang diberikan oleh narasumber.

2. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu di wilayah lingkungan Dinas Pendidikan. Narasumber yang akan memberikan pelatihan adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya.

➤ **Jumlah Peserta**

Masyarakat /Warga belajar usia produktif yang belum bisa membaca dan menulis sebanyak 25 orang. Warga belajar yang bisa mengikuti adalah warga belajar yang usia produktif (15 Th sampai dengan 59 tahun) yang berpendidikan rendah atau buta huruf terdiri dari laki-laki atau perempuan pada desa yang ditetapkan.

➤ **Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung Jawab Kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Non Formal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

❖ Jadwal dan Matrik Kegiatan

➤ Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan direncanakan untuk dilaksanakan pada :

No.	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap Persiapan												
2	Tahap Pelaksanaan												
3	Tahap Penyelesaian												

❖ Lokasi Kegiatan

- ❖ Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dilaksanakan di wilayah Kota Batu.

3. Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan adalah adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

G. Spesifikasi

- 1) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dilaksanakan selama beberapa pertemuan (10 kali pertemuan) dalam bentuk pembelajaran klasikal dengan dipandu oleh beberapa narasumber / Instruktur yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang berkompeten.
- 2) Pelaksanaan dilaksanakan dengan memberikan pembelajaran secara teori dan kemudian praktek bersama sama dengan semua warga belajar yang dibentuk kelompok kelompok
- 3) Jumlah Warga belajar adalah 25 (duapuluh lima) orang

H. Anggaran Biaya

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan memerlukan biaya anggaran dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

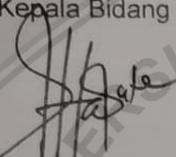
1. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)	Rp.	1.000.000,00
2. Belanja Jasa Kantor	Rp.	14.000.000,00
3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.	945.000,00
4. Belanja Makan Minum	Rp.	4.962.500,00
5. Belanja Pakaian Kerja	Rp.	3.102.000,00

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 6. Belanja Bahan/Material | Rp. 9.697.220,00 |
| 7. Belanja Transportasi dan Akomodasi | Rp. 12.500.000,00 |

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan membutuhkan dana Anggaran sebesar Rp. 46.206.720,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan kode rekening kegiatan 1.01.1.01.01.01.23.12

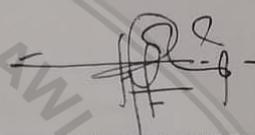
Kepala Bidang PNF

Kepala Seksi Dikmas & Kesetaraan


TITING NURHAYATI, S.Pd., MH

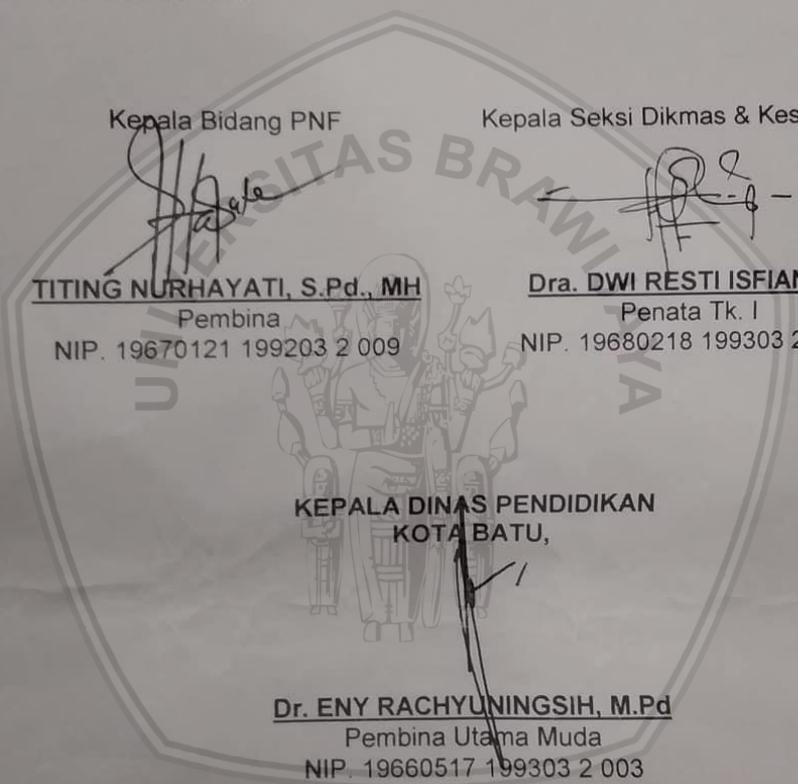
Pembina

NIP. 19670121 199203 2 009


Dra. DWI RESTI ISFIANAH

Penata Tk. I

NIP. 19680218 199303 2 009


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATU,**


Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199303 2 003



Gambar 1:
Wawancara dengan Ibu Titing Nurhayati selaku Kepala Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan Kota Batu



Gambar 2:
Wawancara dengan Mas Dani selaku masyarakat Kota Batu yang mengikuti
program
Keaksaraan Fungsional



Gambar 3:
Wawancara dengan Mas Anugerah selaku masyarakat Kota Batu yang mengikuti Program Keaksaraan Fungsional

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI IMPLEMENTASI
PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BUTA AKSARA**

(Studi di Dinas Pendidikan Kota Batu)

Fokus 1 : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Buta Aksara

a. Aspek Program (Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran)

1. Apa tujuan diadakannya program Keaksaraan Fungsional?
2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran program Keaksaraan Fungsional?
3. Apa harapan yang diinginkan dari program Keaksaraan Fungsional?
4. Apa tanggapan para anggota yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional?
5. Apakah program Keaksaraan Fungsional telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran?
6. Bagaimana dampak yang diberikan kepada masyarakat atau individu dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional?

b. Aspek Organisasi (Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana)

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional?
2. Sejak kapan program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kota Batu terkait dengan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional?
5. Berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk program Keaksaraan Fungsional?

c. Aspek kelompok sasaran (Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi pelaksana)

1. Kontribusi apa yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Batu kepada kelompok sasaran dalam pelaksanaan program ini?
2. Apakah Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan sosialisasi program Keaksaraan Fungsional kepada masyarakat?
3. Apakah ada kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat demi lancarnya pelaksanaan program ini?

Fokus 2 : Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dalam Implementasi Keaksaraan Fungsional.

a. Faktor Pendukung

1. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional?

b. Faktor Penghambat

1. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional?